



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 21 TAHUN 2018  
TENTANG  
STRATEGI NASIONAL PERCEPATAN PEMBANGUNAN  
DAERAH TERTINGGAL TAHUN 2015-2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Strategi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun 2015-2019;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5598);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG STRATEGI NASIONAL PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL TAHUN 2015-2019.

Pasal 1 ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Strategi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal yang selanjutnya disebut STRANAS-PPDT adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah tertinggal untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.
2. Strategi Daerah Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Provinsi yang selanjutnya disebut STRADA-PPDT Provinsi adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah tertinggal untuk periode 5 (lima) tahun di tingkat provinsi yang merupakan bagian integral dari rencana pembangunan jangka menengah provinsi.
3. Strategi Daerah Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Kabupaten yang selanjutnya disebut STRADA-PPDT Kabupaten adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah tertinggal untuk periode 5 (lima) tahun di tingkat kabupaten yang merupakan bagian integral dari rencana pembangunan jangka menengah kabupaten.
4. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, dan kesekretariatan lembaga nonstruktural.

5. Pemerintah ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

5. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah.

#### Pasal 2

STRANAS-PPDT bertujuan untuk membangun sinergi dan sinkronisasi kebijakan serta program percepatan pembangunan daerah tertinggal secara nasional.

#### Pasal 3

- (1) STRANAS-PPDT menjadi pedoman dalam penyusunan rencana strategis Instansi Pusat dan Instansi Daerah.
- (2) STRANAS-PPDT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

#### Pasal 4

- (1) STRANAS-PPDT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan secara terkoordinasi oleh Instansi Pusat dan mendapat dukungan dari Pemerintah Daerah, Instansi Daerah, pelaku usaha, dan masyarakat.
- (2) Pelaksanaan STRANAS-PPDT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan daerah tertinggal.

Pasal 5 ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

#### Pasal 5

- (1) Dalam rangka percepatan pembangunan daerah tertinggal, gubernur menetapkan STRADA-PPDT Provinsi dan bupati menetapkan STRADA-PPDT Kabupaten.
- (2) STRADA-PPDT Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah daerah provinsi dengan memperhatikan STRANAS-PPDT.
- (3) STRADA-PPDT Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten dengan memperhatikan STRADA-PPDT Provinsi dan STRANAS-PPDT.

#### Pasal 6

- (1) Pendanaan yang diperlukan untuk penyelenggaraan STRANAS-PPDT dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (2) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirincikan dalam anggaran masing-masing Instansi Pusat.
- (3) Selain pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendanaan yang diperlukan untuk penyelenggaraan STRANAS-PPDT dapat diperoleh dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 7

Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan daerah tertinggal dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perencanaan pembangunan nasional memfasilitasi penyusunan STRADA-PPDT Provinsi dan STRADA-PPDT Kabupaten/Kota.

#### Pasal 8

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 27 Maret 2018  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 2 April 2018  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 41

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KABINET RI  
Deputi Bidang Pembangunan  
Manusia dan Kebudayaan,





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN  
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 21 TAHUN 2018  
TENTANG  
STRATEGI NASIONAL PERCEPATAN  
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL TAHUN  
2015-2019

STRATEGI NASIONAL PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH  
TERTINGGAL TAHUN 2015-2019

SISTEMATIKA

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Tujuan, Sasaran, dan Arah Kebijakan

BAB II PENDEKATAN, PRINSIP, DAN POLA PELAKSANAAN  
PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL

- A. Pendekatan Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal
- B. Prinsip Pelaksanaan
- C. Pola Kebijakan
- D. Prioritas Pembangunan Wilayah

BAB III SASARAN, ARAH KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PERCEPATAN  
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL PER WILAYAH

- A. Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal di Wilayah Papua
- B. Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal di Wilayah Maluku
- C. Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal di Wilayah Nusa Tenggara
- D. Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal di Wilayah Sulawesi
- E. Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal di Wilayah Kalimantan
- F. Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal di Wilayah Jawa
- G. Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal di Wilayah Sumatera

BAB IV PENUTUP

BAB I ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Amanat konstitusi menegaskan bahwa percepatan pembangunan daerah tertinggal merupakan bagian dari cita-cita nasional untuk mewujudkan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Percepatan pembangunan daerah tertinggal juga menjadi bagian dari perwujudan tujuan nasional yang tertuang dalam Alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Sejalan dengan agenda pembangunan Nawacita yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 terutama Nawacita ketiga yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia maka pembangunan daerah tertinggal merupakan pemihakan (afirmasi) kepada rakyat di daerah tertinggal.

Percepatan pembangunan daerah tertinggal hanya dapat dilakukan dengan memperkuat koordinasi, kerja sama, dan kemitraan antara Instansi Pusat dengan Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten, Instansi Daerah, masyarakat, perguruan tinggi, dan pelaku usaha yang solid dan berkelanjutan. Oleh sebab itu, dalam upaya memperkuat koordinasi, kerja sama, dan kemitraan maka diperlukan STRANAS-PPDT.

B. Tujuan ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

## B. Tujuan, Sasaran, dan Arah Kebijakan

Tujuan STRANAS-PPDT adalah memberikan pedoman bagi Instansi Pusat dan Instansi Daerah dalam menyusun program dan kegiatan guna mendukung percepatan pembangunan daerah tertinggal serta memberikan acuan bagi Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten dalam menyusun STRADA-PPDT Provinsi dan STRADA-PPDT Kabupaten yang berisi strategi, program, dan kegiatan untuk mendorong percepatan pembangunan daerah tertinggal.

Sasaran STRANAS-PPDT adalah:

1. meningkatnya rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal sebesar 6,9% (enam koma sembilan persen) sampai 7,1% (tujuh koma satu persen);
2. menurunnya persentase penduduk miskin di daerah tertinggal menjadi 15% (lima belas persen) sampai 15,5% (lima belas koma lima persen);
3. meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia di daerah tertinggal sebesar 62,78; dan
4. berkurangnya kesenjangan antarwilayah yang ditandai dengan terentaskannya 80 kabupaten tertinggal.

Untuk memberikan kerangka logis dalam mencapai sasaran percepatan pembangunan daerah tertinggal akan ditunjukkan dalam Tabel 1.1 berikut ini.

Tabel 1.1 ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Tabel 1.1  
Kerangka Logis Strategi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah  
Tertinggal Sampai Dengan Tahun 2019

SASARAN	KELUARAN JANGKA MENENGAH	KELUARAN JANGKA PENDEK	PROGRAM	PENANGGUNG JAWAB
Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia di Daerah Tertinggal	Kesehatan (Angka Harapan Hidup)	Jumlah Dokter per 1000 Penduduk* (Persentase)	Program pemenuhan tenaga kesehatan	Kementerian Kesehatan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Instansi Pusat Terkait
			Program peningkatan angka harapan hidup	
			Program pembangunan fasilitas kesehatan	
Harapan Lama Sekolah	Harapan Lama Sekolah	Angka Partisipasi Sekolah SMP (Persentase)	Program peningkatan rata-rata lama sekolah	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Instansi Pusat Terkait
		Angka Partisipasi Sekolah SMA (Persentase)	Program peningkatan angka melek huruf	
			Program pembangunan sarana dan prasarana pendidikan	
	Standar hidup layak (Pendapatan Nasional Bruto Perkapita) (ribu rupiah per tahun)	-	Program pengembangan potensi perekonomian daerah	Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Instansi Pusat Terkait
Meningkatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi di Daerah Tertinggal (Persentase)	Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja (Produk Domestik Regional Bruto/Tenaga Kerja) (juta/orang/tahun)	Peningkatan persentase desa dengan ketersediaan jalan memadai (jalan aspal)* (Persentase)	Program pengentasan kemiskinan	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Kementerian Sosial, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Instansi Pusat Terkait
			Program pembangunan pasar tanpa bangunan	Kementerian Perdagangan, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Instansi Pusat Terkait

SASARAN ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

SASARAN	KELUARAN JANGKA MENENGAH	KELUARAN JANGKA PENDEK	PROGRAM	PENANGGUNG JAWAB
			Program peningkatan aksesibilitas menuju ibu kota kabupaten, pusat perekonomian, layanan pendidikan dasar, dan layanan kesehatan	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perhubungan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Instansi Pusat Terkait
			Program pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Instansi Pusat Terkait
Penurunan Persentase Penduduk Miskin (Persentase)	Penurunan Persentase Penduduk Miskin (Garis Kemiskinan). (Rp/kapita/bulan)	Peningkatan persentase rumah tangga pengguna listrik & air bersih (Utilitas)* (Persentase)	Program pengentasan kemiskinan	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Kementerian Sosial, Kementerian Pariwisata, Kementerian Pertanian, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Instansi Pusat Terkait
			Program pemenuhan elektrifikasi	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Instansi Pusat Terkait
			Program penyediaan air bersih dan sanitasi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Pertanian, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Instansi Pusat Terkait
			Program pembangunan perumahan dan permukiman layak	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Instansi Pusat Terkait

Tabel 1.2 ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Tabel 1.2  
Sasaran Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal

Sasaran	Tahun Dasar	Target					KELUARAN JANGKA MENENGAH	Tahun Dasar	Target					KELUARAN JANGKA PENDEK	Tahun Dasar	Target				
	2014	2015*	2016	2017	2018	2019		2014	2015*	2016	2017	2018	2019		2014	2015*	2016	2017	2018	2019
Meningkatnya IPM di Daerah Tertinggal	5,23	59,88	60,63	61,34	62,06	62,78	Kesehatan (Angka Harapan Hidup)	66,47	66,69	66,92	67,15	67,38	67,61	Jumlah Dokter per 1000 Penduduk (Persentase)	0,23**	0,24	0,25	0,27	0,30	0,33
							Harapan Lama Sekolah (tahun)	11,48	11,70	11,92	12,16	12,40	12,66	Angka Partisipasi Sekolah Menengah Pertama (Persentase)	91,02	92,06	91,86	92,99	93,55	94,11
							Standar hidup layak (Pendapatan Nasional Bruto Perkapita) (Ribu rupiah per tahun)	7,12	7,24	7,38	7,53	7,69	7,85	Angka Partisipasi Sekolah Menengah Atas (Persentase)	68,55	68,42	68,28	71,11	72,52	73,93

Meningkatnya ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

<b>Meningkatnya Laju Petumbuhan Ekonomi di Daerah Tertinggal (Persentase)</b>	5,99	7,44	6,0 6,2	6,4 6,6	6,7 6,9	6,9 7,1	<b>Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja (Produk Domestik Regional Bruto/Tenaga Kerja) (Juta/orang/tahun)</b>	37,34	40,10	42,59	44,36	47,31	50,66	<b>Peningkatan persentase desa dengan ketersediaan jalan memadai (jalan aspal) (Persentase)</b>	40,38**	41,94	44,16	46,50	48,69	50,82
<b>Penurunan Persentase Penduduk Miskin (Persentase)</b>	18,00	21,49	17,5 18,0	16,0 16,5	15,5 16,0	15,0 15,5	<b>Penurunan Persentase Penduduk Miskin (Garis Kemiskinan) (Rp/kapita/bulan)</b>	34.029.164	39.239.912	42.844.490	46.557.931	50.652.304	55.170.758	<b>Peningkatan persentase rumah tangga pengguna listrik &amp; air bersih (Utilitas) (Persentase)</b>	63,39	64,94	66,49	67,86	69,23	71,96

Ket:

\* Realisasi

\*\* Data Podes 2014

Sumber: BPS (Podes 2014, Susenas 2015) data diolah Dit. PIDT KIDPDTT, 2017

Upaya ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

Upaya pengentasan daerah tertinggal difokuskan melalui intervensi kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah tertinggal dengan memperhatikan akar masalah yang menjadi penyebab utama ketertinggalan suatu daerah, peringkat ketertinggalan daerah, persebaran daerah tertinggal antarprovinsi, capaian kinerja pembangunan secara keseluruhan dan karakteristik daerah tertentu yang memerlukan keberpihakan secara simultan dan masif dari Pemerintah Pusat, Instansi Pusat, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten, Instansi Daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, swasta, dan seluruh pemangku kepentingan lainnya.

Arah kebijakan percepatan pembangunan daerah tertinggal difokuskan pada:

1. promosi potensi daerah tertinggal untuk mempercepat pembangunan, sehingga terbangun kemitraan dengan banyak pihak dan promosi daerah tertinggal ini juga akan mendorong masyarakat semakin mengetahui potensi daerah tersebut dan akan aktif dalam membantu pembangunan;
2. pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar publik; dan
3. pengembangan perekonomian masyarakat yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan infrastruktur penunjang konektivitas antara daerah tertinggal dan pusat pertumbuhan.

BAB II ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

## BAB II

### PENDEKATAN, PRINSIP, DAN POLA PELAKSANAAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL

#### A. Pendekatan Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal

STRANAS-PPDT merupakan acuan bagi Instansi Pusat, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten, Instansi Daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, swasta, dan seluruh pemangku kepentingan lainnya dalam menyelenggarakan percepatan pembangunan daerah tertinggal. Dibutuhkan beberapa pendekatan agar program percepatan pembangunan daerah tertinggal dapat terlaksana dengan baik dan berkelanjutan, yakni yang dikemukakan berikut ini.

##### 1. Pembangunan dari Pinggiran

Pendekatan ini menekankan pada pengembangan pusat pertumbuhan dengan menguatkan daerah penyangga (*hinterland*) khususnya daerah tertinggal seraya meningkatkan konektivitas antarwilayah melalui pembangunan sarana dan prasarana penunjang, guna mendorong pertumbuhan ekonomi baik di perkampungan (dusun), desa, kecamatan, distrik, kawasan transmigrasi, maupun di kawasan perbatasan.

Pendekatan ini juga menekankan pada pemerataan pembangunan dengan tetap memperhatikan karakteristik wilayah melalui perluasan akses pelayanan dasar di daerah tertinggal, terutama bagi masyarakat yang bergerak dalam bidang pertanian, perikanan, maupun usaha kecil dan menengah, sehingga dapat meningkatkan produksi, nilai tambah, dan pendapatan.

##### 2. Pembangunan yang Inklusif

Pendekatan ini menekankan pada keterlibatan seluruh lapisan masyarakat, termasuk kaum perempuan, masyarakat miskin, dan kelompok marjinal lainnya, dalam penyelenggaraan pembangunan baik peningkatan pelayanan dasar, akses informasi dan pasar, maupun aspek pembangunan lainnya yang berorientasi pada peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

##### 3. Pembangunan ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

3. Pembangunan yang Afirmatif

Pendekatan ini menekankan pada keberpihakan terhadap daerah tertinggal, sehingga memiliki kesempatan yang lebih luas dalam hal pemetaan masalah dan potensi serta pemecahan masalah dalam bentuk realisasi pembangunan, sebagai bagian dari percepatan pembangunan daerah tertinggal yang menjadi prioritas pembangunan nasional.

4. Interkonektivitas Wilayah dan Sektor Pembangunan

Pendekatan ini menekankan pada penyelenggaraan pembangunan terintegrasi yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan masyarakat yang dapat meningkatkan interkonektivitas antara pusat pertumbuhan terhadap daerah tertinggal, baik dalam bentuk akses pelayanan dasar, transportasi, informasi, permodalan, maupun akses pasar.

5. Membangun dengan Jaringan

Pendekatan yang menekankan pada keterlibatan seluruh pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah tertinggal secara terintegrasi dan berkesinambungan. Perwujudan dari keterlibatan tersebut adalah kemitraan, baik dalam bentuk penyelenggaraan pelayanan publik, mendorong investasi berbasis potensi lokal, transfer pengetahuan, berbagi informasi dan teknologi, serta bantuan akses manajemen, permodalan, dan akses pasar.

6. Pembangunan Berwawasan Ekologis

Pendekatan yang menekankan pada kaidah pembangunan yang berkelanjutan terutama dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan dengan mempertimbangkan karakteristik ketertinggalan daerah, isu strategis, potensi, maupun kebutuhan daerah dalam kerangka percepatan pembangunan.

B. Prinsip ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

## B. Prinsip Pelaksanaan

Prinsip percepatan pembangunan daerah tertinggal dikemukakan berikut ini.

### 1. Berorientasi pada Masyarakat

Penyelenggaraan pembangunan daerah tertinggal diarahkan untuk mendorong pemenuhan kebutuhan masyarakat baik sebagai penerima manfaat sekaligus sebagai pelaku penyelenggaraan pembangunan yang dilaksanakan sehingga diharapkan masyarakat akan menerima manfaat yang optimal dan bertanggung jawab terhadap program pembangunan daerah tertinggal.

### 2. Sesuai dengan Adat Istiadat dan Budaya Setempat

Penyelenggaraan pembangunan melalui program dan kegiatan pembangunan daerah tertinggal dengan tetap memperhatikan adat istiadat dan budaya yang telah berkembang sebagai suatu kearifan lokal yang memperkaya khazanah budaya bangsa.

### 3. Berwawasan Lingkungan

Penyelenggaraan pembangunan harus berwawasan lingkungan dan berkelanjutan, yakni melakukan pembangunan untuk memenuhi kebutuhan hari ini tanpa mengorbankan kebutuhan generasi mendatang dengan menitikberatkan pada daya dukung lingkungan, pencapaian keadilan sosial, dan keberlanjutan ekonomi dan budaya masyarakat di daerah tertinggal.

### 4. Demokratis dan Berkeadilan

Penyelenggaraan pembangunan harus melibatkan masyarakat secara aktif baik dari sisi perencanaan, pelaksanaan, maupun pengawasan pembangunan dengan tetap memperhatikan kesetaraan hak dan kewajiban. Selanjutnya, hasil pembangunan juga harus dapat dirasakan oleh semua pihak, tidak diskriminatif dari segi suku, agama, ras, dan golongan.

### 5. Transparan ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

5. Transparan dan Akuntabel

Penyelenggaraan pembangunan dilaksanakan secara terbuka mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, hingga proses pengawasan dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Pola Kebijakan

Percepatan pembangunan daerah tertinggal merupakan tanggung jawab seluruh elemen yakni Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, swasta, dan masyarakat, termasuk perguruan tinggi. Pola kebijakan tersebut merujuk pada konsepsi dari keterlibatan para pemangku kepentingan dalam pelaksanaan program dan kegiatan percepatan pembangunan daerah tertinggal, yang dikemukakan berikut ini.

1. Koordinasi

Sebagai motor penggerak percepatan pembangunan daerah tertinggal, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan daerah tertinggal harus dapat mengkoordinasikan terkait sasaran, strategi, arah kebijakan, fokus, lokus program dan kegiatan percepatan pembangunan daerah tertinggal dengan Instansi Pusat, guna terwujudnya implementasi kebijakan, program dan kegiatan percepatan pembangunan daerah tertinggal yang terintegrasi dengan semangat kebersamaan, sehingga hasil pembangunan dapat dirasakan secara signifikan oleh masyarakat di daerah tertinggal.

2. Otonomi Daerah

Semangat otonomi daerah yang diwujudkan melalui desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan, serta otonomi desa merupakan salah satu pintu masuk bagi terciptanya percepatan pembangunan daerah tertinggal. Kebijakan percepatan pembangunan yang dilaksanakan oleh provinsi, kabupaten, dan desa diharapkan dapat bersinergi dengan kebijakan Pemerintah Pusat, dengan tetap mengacu pada kewenangan dan urusan masing-masing tingkat pemerintahan, sehingga tercipta implementasi program dan kegiatan percepatan pembangunan daerah tertinggal yang terintegrasi dan tepat sasaran.

3. Partisipatif ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

### 3. Partisipatif

Penyelenggaraan percepatan pembangunan daerah tertinggal melibatkan masyarakat mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan percepatan pembangunan daerah tertinggal, sehingga tercipta transparansi sekaligus mengawal terpenuhinya kebutuhan masyarakat. Sementara itu, perguruan tinggi juga harus dapat berkontribusi baik melalui kajian, hasil penelitian lapangan, maupun transfer pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya, keterlibatan swasta adalah mendukung implementasi program dan kegiatan percepatan pembangunan daerah tertinggal baik dari sisi pendanaan, berbagi informasi, dan akses pasar, serta kontribusi lainnya yang tidak mengikat.

#### D. Prioritas Percepatan Pembangunan Wilayah

Sebagai pedoman dalam rangka pewujudan dari upaya percepatan pembangunan daerah tertinggal, prioritas percepatan pembangunan daerah tertinggal sangat dibutuhkan, dengan tetap mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Adapun prioritas percepatan pembangunan per wilayah yakni yang dikemukakan berikut ini.

##### 1. Wilayah Papua

- a. percepatan pengembangan industri berbasis komoditas lokal yang bernilai tambah pada sektor/subsektor pertanian (sagu, ubi jalar, dan padi), perkebunan (karet, kopi, buah merah, dan kakao), peternakan (sapi dan babi), dan kehutanan (rotan);
- b. percepatan pengembangan ekonomi kemaritiman melalui pengembangan industri perikanan (perikanan tangkap) dan pariwisata bahari serta pendukungnya;
- c. percepatan pengembangan pariwisata budaya dan alam melalui pengembangan potensi sosial budaya dan keanekaragaman hayati;

d. penguatan ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

- d. penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan daerah dan masyarakat untuk meningkatkan kapasitas keuangan daerah; dan
  - e. pengembangan kawasan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan berbasis wilayah kampung masyarakat adat, melalui percepatan peningkatan kualitas sumber daya manusia Papua yang mandiri, produktif, dan berkepribadian.
2. Wilayah Maluku
- a. menjadikan daerah tertinggal sebagai produsen makanan laut dan lumbung ikan nasional;
  - b. percepatan pembangunan perekonomian berbasis maritim (kelautan) melalui pengembangan industri berbasis komoditas perikanan dengan mengembangkan kawasan minapolitan dan kawasan perairan terpadu; dan
  - c. pengembangan pariwisata bahari.
3. Wilayah Nusa Tenggara
- a. menjadikan daerah tertinggal sebagai pintu gerbang pariwisata ekologis melalui pengembangan industri pertemuan, insentif, konvensi, dan pameran (*Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition*);
  - b. penopang pangan nasional dengan percepatan pembangunan perekonomian berbasis maritim (kelautan) melalui pengembangan industri perikanan, garam, dan rumput laut; dan
  - c. pengembangan industri berbasis peternakan sapi dan perkebunan jagung.
4. Wilayah Sulawesi
- a. menjadikan daerah tertinggal sebagai salah satu pintu gerbang Indonesia dalam perdagangan internasional dan pintu gerbang kawasan timur Indonesia dengan pengembangan industri berbasis logistik;

b. lumbung ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

- b. lumbung pangan nasional dengan pengembangan industri berbasis kakao, padi, dan jagung; dan
  - c. percepatan pembangunan ekonomi berbasis maritim (kelautan) melalui pengembangan industri perikanan dan pariwisata bahari.
5. Wilayah Kalimantan
- a. mempertahankan fungsi Kalimantan sebagai paru-paru dunia internasional dengan meningkatkan konservasi dan rehabilitasi daerah aliran sungai, lahan kritis, hutan lindung, dan hutan produksi serta mengembangkan sistem bencana alam banjir dan kebakaran hutan;
  - b. lumbung energi nasional dengan pengembangan hilirisasi pengembangan energi baru terbarukan berbasis biomassa, air, matahari, atau sesuai dengan kondisi sumber daya alam daerah tertinggal;
  - c. pengembangan industri berbasis komoditas kelapa sawit dan karet; dan
  - d. menjadikan Kalimantan sebagai salah satu lumbung pangan nasional.
6. Wilayah Jawa
- a. menjadikan daerah tertinggal menjadi salah satu lumbung pangan nasional (padi dan jagung); dan
  - b. percepatan pembangunan ekonomi berbasis maritim (kelautan) melalui pengembangan industri perikanan (perikanan tangkap dan perikanan budidaya) dan pengembangan budidaya garam.
7. Wilayah Sumatera
- a. lumbung energi nasional, termasuk pengembangan energi terbarukan berbasis biomassa;
  - b. industri berbasis komoditas kelapa sawit dan karet; dan
  - c. percepatan pembangunan ekonomi berbasis maritim (kelautan) melalui pengembangan industri perikanan, pariwisata bahari, dan industri perkebunan.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

BAB III  
SASARAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI WILAYAH PERCEPATAN  
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL

A. Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal di Wilayah Papua

1. Penyebab Utama Ketertinggalan di Wilayah Papua

Berdasarkan analisis indeks ketertinggalan pada 42 (empat puluh dua) kabupaten/kota di wilayah Papua, terdapat 33 (tiga puluh tiga) kabupaten sebesar 78,57% (tujuh puluh delapan koma lima puluh tujuh persen) yang dikategorikan tertinggal dan 9 (sembilan) kabupaten sebesar 21,43% (dua puluh satu koma empat puluh tiga persen) tidak tertinggal. Daftar kabupaten tertinggal dan penyebab utama ketertinggalan di wilayah Papua akan ditunjukkan dalam Tabel 3.1 berikut ini.

Tabel 3.1

Daftar Kabupaten Tertinggal dan Penyebab Utama Ketertinggalan

Wilayah Papua Tahun 2015-2019

No.	Kabupaten	Provinsi	Penyebab Utama Ketertinggalan Menurut Urutan					
			1	2	3	4	5	6
1	Teluk Wondama	Papua Barat	Ekonomi	Aksesibilitas	Karakteristik Daerah	Kemampuan Keuangan Daerah	Sumber Daya Manusia	-
2	Teluk Bintuni		Aksesibilitas	Ekonomi	Karakteristik Daerah	-	-	-
3	Sorong Selatan		Ekonomi	Aksesibilitas	Kemampuan Keuangan Daerah	Sumber Daya Manusia	Karakteristik Daerah	-
4	Sorong		Ekonomi	Aksesibilitas	-	-	-	-
5	Raja Ampat		Aksesibilitas	Ekonomi	Sumber Daya Manusia	-	-	-
6	Tambrau		Ekonomi	Aksesibilitas	Sumber Daya Manusia	Kemampuan Keuangan Daerah	-	-
7	Maybrat		Ekonomi	Aksesibilitas	Kemampuan Keuangan Daerah	-	-	-
8	Merauke	Papua	Aksesibilitas	Sumber Daya Manusia	Ekonomi	Sarana dan Prasarana	-	-



PRESIDEN  
REPUBLIC INDONESIA

- 17 -

No.	Kabupaten	Provinsi	Penyebab Utama Keteringgalan Menurut Urutan					
			1	2	3	4	5	6
9	Jayawijaya		Ekonomi	Sumber Daya Manusia	Sarana dan Prasarana	Aksesibilitas	-	-
10	Nabire		Aksesibilitas	Ekonomi	Sumber Daya Manusia	Karakteristik Daerah	Kemampuan Keuangan Daerah	-
11	Kepulauan Yapen		Ekonomi	Kemampuan Keuangan Daerah	Aksesibilitas	-	-	-
12	Biak Numfor		Ekonomi	Aksesibilitas	Kemampuan Keuangan Daerah	-	-	-
13	Paniai		Ekonomi	Sumber Daya Manusia	Sarana dan Prasarana	Aksesibilitas	Karakteristik Daerah	Kemampuan Keuangan Daerah
14	Puncak Jaya		Aksesibilitas	Sarana dan Prasarana	Ekonomi	Sumber Daya Manusia	-	-
15	Boven Digoel		Aksesibilitas	Sumber Daya Manusia	Ekonomi	-	-	-
16	Mappi		Aksesibilitas	Sumber Daya Manusia	Ekonomi	Sarana dan Prasarana	-	-
17	Asmat		Aksesibilitas	Sumber Daya Manusia	Ekonomi	Sarana dan Prasarana	Karakteristik Daerah	-
18	Yahukimo		Aksesibilitas	Ekonomi	Sumber Daya Manusia	Sarana dan Prasarana	-	-
19	Pegunungan Bintang		Aksesibilitas	Sumber Daya Manusia	Ekonomi	Sarana dan Prasarana	-	-
20	Tolikara		Aksesibilitas	Sarana dan Prasarana	Sumber Daya Manusia	Ekonomi	-	-
21	Sarmi		Aksesibilitas	Sumber Daya Manusia	Ekonomi	-	-	-
22	Keerom		Aksesibilitas	Ekonomi	Kemampuan Keuangan Daerah	Sumber Daya Manusia	-	-
23	Waropen		Aksesibilitas	Ekonomi	Sumber Daya Manusia	Karakteristik Daerah	Kemampuan Keuangan Daerah	-
24	Supiori		Ekonomi	Aksesibilitas	Kemampuan Keuangan Daerah	Karakteristik Daerah	Sumber Daya Manusia	-
25	Mamberamo Raya		Aksesibilitas	Ekonomi	Sumber Daya Manusia	-	-	-
26	Nduga		Sumber Daya Manusia	Ekonomi	Sarana dan Prasarana	Aksesibilitas	Kemampuan Keuangan Daerah	-
27	Lanny Jaya		Ekonomi	Sumber Daya Manusia	Sarana dan Prasarana	Aksesibilitas	-	-



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

No.	Kabupaten	Provinsi	Penyebab Utama Keteringgalan Menurut Urutan					
			1	2	3	4	5	6
28	Mamberamo Tengah		Ekonomi	Sumber Daya Manusia	Sarana dan Prasarana	Aksesibilitas	-	-
29	Yalimo		Ekonomi	Sumber Daya Manusia	Sarana dan Prasarana	Karakteristik Daerah	-	-
30	Puncak		Ekonomi	Sumber Daya Manusia	Sarana dan Prasarana	Aksesibilitas	-	-
31	Dogiyai		Ekonomi	Sumber Daya Manusia	Aksesibilitas	Sarana dan Prasarana	Karakteristik Daerah	Kemampuan Keuangan Daerah
32	Intan Jaya		Sumber Daya Manusia	Ekonomi	Aksesibilitas	Sarana dan Prasarana	Karakteristik Daerah	-
33	Deiyai		Ekonomi	Sumber Daya Manusia	Sarana dan Prasarana	Kemampuan Keuangan Daerah	-	-

## 2. Potensi dan Keterkaitan Wilayah

Pengembangan potensi kabupaten tertinggal di wilayah Papua memperhatikan potensi yang dimiliki pada setiap kabupaten sehingga diharapkan dapat menghasilkan potensi unggulan wilayah. Dalam rangka mengembangkan sektor primer yang merupakan sektor basis di seluruh kabupaten tertinggal di wilayah Papua, diperlukan pengembangan potensi wilayah dari aspek hulu dan hilir secara terintegrasi, antara lain melalui pengembangan agroindustri. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah dan diharapkan dapat mentransformasikan struktur ekonomi wilayah dari pertanian ke industri yang berbasis pada agroindustri. Hilirisasi dari pengolahan potensi unggulan berorientasi pada keterkaitan kabupaten tertinggal dengan daerah pusat pertumbuhan lainnya. Dalam konteks pengembangan rantai industri strategis, hilirisasi potensi sumber daya alam akan dapat memperkuat basis ekonomi wilayah Papua secara keseluruhan.

Pengembangan ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

Pengembangan sektor unggulan di daerah tertinggal dan kawasan perbatasan (Pusat Kawasan Strategis Nasional Merauke, Pusat Kawasan Strategis Nasional Jayapura, dan Pusat Kawasan Strategis Nasional Tanah Merah) dilakukan melalui:

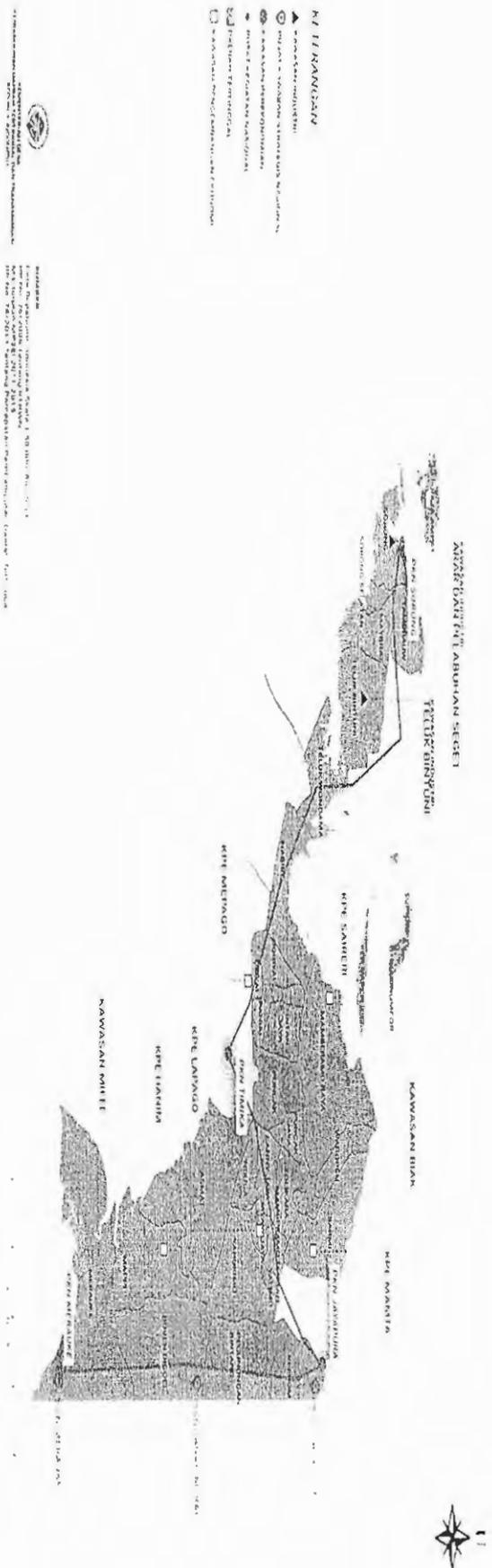
- a. peningkatan produktivitas di hulu dan percepatan industrialisasi/hilirisasi melalui sektor pertanian, perkebunan, dan peternakan;
- b. pengembangan ekonomi kemaritiman melalui pengembangan industri perikanan dan wisata bahari; dan
- c. pengembangan potensi budaya dan keanekaragaman hayati melalui pariwisata budaya dan lingkungan hidup (taman nasional dan cagar alam).



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

Gambar 1  
Peta Sebaran Daerah Tertinggal dan Pusat Pertumbuhan di Wilayah Papua





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

Untuk menunjang pengembangan sektor unggulan, diperlukan pengembangan ekonomi wilayah secara terintegrasi dari aspek hulu dan hilir (keterkaitan sektor) dengan meningkatkan konektivitas antara daerah pinggiran, seperti daerah tertinggal dan kawasan perbatasan ke pusat pertumbuhan/kawasan strategis yakni dengan Kawasan Industri Arar dan Pelabuhan Seget, Kawasan Industri Teluk Bintuni, Kawasan Biak, Kawasan Pengembangan Ekonomi Saireri, Kawasan Pengembangan Ekonomi Me Pago, Kawasan Pengembangan Ekonomi La Pago, Kawasan Pengembangan Ekonomi Hanim, Kawasan Miffee dan Kawasan Pengembangan Ekonomi Manta. Selanjutnya orientasi pengembangan produk unggulan tersebut menuju gerai pemasaran wilayah yakni ke Pusat Kegiatan Nasional Sorong, Pusat Kegiatan Nasional Timika, Pusat Kegiatan Nasional Jayapura, dan Pusat Kegiatan Nasional Merauke.

3. Sasaran Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal di Wilayah Papua

Sasaran pengembangan wilayah Papua sampai dengan tahun 2019 sebagaimana ditunjukkan dalam Tabel 3.2 berikut ini.

Tabel 3.2 ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

Tabel 3.2  
Sasaran Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Wilayah Papua

Sasaran	Tahun Dasar	Target					KELUARAN JANGKA MENENGAH	Tahun Dasar	Target					KELUARAN JANGKA PENDEK	Tahun Dasar	Target				
	2014	2015*	2016	2017	2018	2019		2014	2015*	2016	2017	2018	2019		2014	2015*	2016	2017	2018	2019
Meningkatnya M di Daerah Tertinggal	52,88	53,59	53,92	54,44	54,97	55,50	Kesehatan (Angka Harapan Hidup)	68,66	68,89	69,12	69,35	69,59	69,82	Jumlah Dokter per 1000 Penduduk (Persentase)	0,36**	0,37	0,38	0,42	0,45	0,48
							Harapan Lama Sekolah (tahun)	10,46	10,61	10,76	10,93	11,09	11,27	Angka Partisipasi Sekolah Menengah Pertama (Persentase)	80,74	83,55	81,76	83,34	84,13	84,92
							Standar hidup layak (Pendapatan Nasional Bruto Perkapita) (Ribu rupiah per tahun)	6,53	6,59	6,70	6,82	6,94	7,06	Angka Partisipasi Sekolah Menengah Atas (Persentase)	62,20	63,08	62,57	66,28	68,13	69,98

Meningkatnya ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

peningkatannya pertumbuhan ekonomi di pererah tertinggal (persentase)	5,48	5,47	5,69	5,86	6,03	6,37	Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja (Produk Domestik Regional Bruto/Tenaga Kerja) (Juta/orang/tahun)	48,81	51,14	53,69	51,63	54,53	57,78	Peningkatan persentase desa dengan ketersediaan jalan memadai (jalan aspal) (Persentase)	17,21**	17,44	19,94	22,43	24,92	27,45
penurunan persentase penduduk miskin (persentase)	31,39	31,47	28,56	25,40	22,24	19,08	Penurunan Persentase Penduduk Miskin (Garis Kemiskinan) (Rp/kapita/bulan)	11.309.999	12.456.047	13.957.388	15.375.425	16.963.355	18.743.489	Peningkatan persentase rumah tangga pengguna listrik & air bersih (Utilitas) (Persentase)	47,60	49,39	51,18	52,74	54,29	57,40

Ket:

\* Realisasi

\*\* Data Podes 2014

Sumber: BPS (Podes 2014, Susenas 2015) data diolah Dit. PIDT KDPDTT, 2017

4. Arah ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

4. Arah Kebijakan Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal di Wilayah Papua

Arah kebijakan percepatan pembangunan daerah tertinggal di wilayah Papua difokuskan pada:

- a. promosi potensi daerah tertinggal dan pengembangan kemitraan untuk mempercepat pembangunan dan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan daerah;
- b. pemenuhan kebutuhan dasar dan kebutuhan pelayanan dasar publik;
- c. pengembangan perekonomian masyarakat yang berbasis potensi lokal yakni pertanian, perkebunan, peternakan, pengembangan ekonomi kemaritiman melalui pengembangan industri perikanan dan pariwisata bahari, pengembangan potensi budaya dan keanekaragaman hayati melalui pariwisata budaya dan lingkungan hidup (taman nasional dan cagar alam);
- d. peningkatan kualitas sumber daya manusia; dan
- e. pembangunan infrastruktur penunjang konektivitas antara daerah pinggiran, seperti daerah tertinggal dan kawasan perbatasan ke pusat pertumbuhan.

5. Strategi Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal di Wilayah Papua

a. Kriteria Perekonomian Masyarakat

Strategi untuk mendukung pengembangan perekonomian kabupaten tertinggal di wilayah Papua berbasis komoditas unggulan lokal di bidang pertanian, perkebunan, perikanan, dan kemaritiman serta keanekaragaman hayati antara lain sebagai berikut:

1) peningkatan ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

- a) peningkatan promosi dan kemitraan dalam pengembangan potensi unggulan dan khas Papua untuk mendorong peningkatan interaksi dan transaksi ekonomi dalam pengembangan potensi unggulan khas Papua antara lain perkebunan (kakao, sagu, buah merah, kelapa, dan kopi), peternakan (babi dan sapi), pengembangan ekonomi kemaritiman melalui pengembangan industri perikanan dan pariwisata bahari, pengembangan potensi budaya dan keanekaragaman hayati melalui wisata budaya dan lingkungan hidup (taman nasional dan cagar alam); dan
- b) pengembangan ekonomi di kawasan strategis agar dapat menyerap tenaga kerja penduduk asli Papua di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat dengan melakukan:
  - (1) peningkatan produktivitas komoditi unggulan pada 5 (lima) kawasan pengembangan ekonomi berbasis wilayah adat di Provinsi Papua diantaranya pada:
    - (a) Kawasan Pengembangan Ekonomi Mamta (Sarmi, Mamberamo Raya, dan Keerom) dengan produk unggulan minyak goreng, minyak kelapa murni, dan sabun kesehatan kulit (Sarmi), kelapa sawit dan pengolahan biji coklat (Sarmi, Mamberamo Raya, dan Keerom);
    - (b) Kawasan Pengembangan Ekonomi Saireri (Biak Numfor, Supiori, Kepulauan Yapen, dan Waropen) dengan produk unggulan industri pengolahan hasil laut dan pengalengan ikan;
    - (c) Kawasan ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 26 -

- (c) Kawasan Pengembangan Ekonomi Me Pago (Intan Jaya, Paniai, Deiyai, Dogiyai, dan Nabire) dengan produk unggulan pengalengan ikan, pengolahan kopi dan pariwisata Taman Laut Nasional Cendrawasih di Nabire, industri pengolahan Ubi Jalar dan industri pariwisata Danau Paniai, Danau Tage, dan Cagar Alam Lorenzt di Kabupaten Paniai, industri pariwisata Taman Nasional Cartenz dan air garam di Kabupaten Intan Jaya, Pengembangan industri kopi di Kabupaten Dogiyai;
  - (d) Kawasan Pengembangan Ekonomi La Pago (Lanny Jaya, Puncak, Puncak Jaya, Nduga, Yalimo, Yahukimo, Mamberamo Tengah, Tolikara, Jayawijaya, Pegunungan Bintang) dengan produk unggulan buah merah dan kopi; dan
  - (e) Kawasan Pengembangan Ekonomi Ha Anim (Merauke, Asmat, Mappi, Boven Digoel) dengan produk unggulan tebu, padi, peternakan, perikanan, buah merah, dan kopi.
- (2) pengembangan ekonomi di Papua Barat dengan melakukan pengembangan sapi indukan wajib bunting (SIWAB) di Kabupaten Tambrau (Kebar) dan Kabupaten Sorong (Salawati), pengembangan sugu rakyat dan investasi komoditas sugu di Kabupaten Sorong Selatan, pengembangan kawasan pariwisata bahari di Kawasan Raja Ampat, pengembangan pusat kegiatan ekonomi kecil dan menengah guna mendukung potensi sektor pariwisata, terutama industri kreatif dan makanan olahan khas Papua Barat serta pembinaan terhadap mutu produk usaha kecil dan menengah di kawasan Sorong.

c) strategi ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 27 -

c) strategi pengentasan kemiskinan di seluruh kabupaten tertinggal di wilayah Papua antara lain dengan melakukan:

- (1) peningkatan investasi daerah untuk meningkatkan penciptaan lapangan kerja melalui kegiatan produktif di kabupaten tertinggal; dan
- (2) peningkatan aksesibilitas terhadap infrastruktur pelayanan dasar publik bidang pendidikan dan kesehatan yang bermutu dan terjangkau.

b. Kriteria Peningkatan Aksesibilitas

Strategi untuk mendukung kebijakan peningkatan aksesibilitas yang menghubungkan antara kabupaten tertinggal dengan pusat pertumbuhan di kabupaten tertinggal wilayah Papua antara lain:

- 1) percepatan pembangunan sarana prasarana transportasi darat antara lain pengembangan jalan strategis yang menghubungkan Kabupaten Boven Digoel dengan Pegunungan Bintang, Yahukimo, dan Wamena, kemudian jalan strategis di Kabupaten Kepulauan Yapen, Mamberamo Raya, dan Waropen di Provinsi Papua serta Kabupaten Tambrau, Sorong Selatan, dan Maybrat di Provinsi Papua Barat;
- 2) pengembangan pelabuhan terutama di Kabupaten Biak sebagai pendukung tol laut dan pelabuhan internasional di Merauke dan Sorong (Arar) untuk mendukung kawasan industri Teluk Bintuni;
- 3) pembangunan dermaga angkutan sungai dan penyeberangan terutama di Kabupaten Mappi;

4) pengembangan ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 28 -

- 4) pengembangan dermaga penyeberangan terutama di Kabupaten Waropen (Waren), Kepulauan Yapen (Kaonda), Biak Numfor (Penyeberangan Numfor), Supiori (Korido Supiori Selatan dan dermaga Sabarmiokre Supiori Utara), Raja Ampat (Waigeo), dan Tambrauw (Sausapor);
  - 5) pengembangan pelabuhan untuk mendukung perikanan tangkap di Kabupaten Biak (Fandoi), Merauke (Pelabuhan Perikanan Samudera Merauke), dan Sorong (Katapop), serta pengembangan pelabuhan di Nabire;
  - 6) pengembangan bandar udara perintis terutama di Kabupaten Kepulauan Yapen, Nduga (Kenyam), Yalimo (Elelim), Puncak (Sinak Baru dan Ilaga), Intan Jaya (Sugapa), Asmat (penambahan landas pacu Bandar Udara Ewer), Pegunungan Bintang (Oksibil) dan Yahukimo (Ninia, Lolat); dan
  - 7) pengembangan kajian pembangunan Bandar Udara Kenyam (Nduga) dan Pegunungan Bintang (Oksibil).
- d. Kriteria Sumber Daya Manusia
- Penguatan kemampuan sumber daya manusia dan ilmu pengetahuan dan teknologi difokuskan pada afirmasi pendidikan bagi putra-putri asli Papua, peningkatan kapasitas penduduk asli Papua, dan peningkatan kapasitas aparatur di dalam pelayanan publik dan pengelolaan keuangan. Strategi dalam mendukung kebijakan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan ilmu pengetahuan dan teknologi kabupaten tertinggal di wilayah Papua antara lain:
- 1) pemerataan pelayanan kesehatan, obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai (BMHP) di seluruh kabupaten daerah tertinggal;

2) pengembangan ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 29 -

- 2) pengembangan upaya kesehatan berbasis masyarakat melalui pelatihan kader kesehatan;
- 3) pemerataan distribusi, peningkatan kapasitas, dan pemberian tunjangan khusus bagi tenaga pendidik terutama di Kabupaten Intan Jaya, Pegunungan Bintang, Nduga, Yalimo, Puncak, Yahukimo, Mamberamo Tengah, dan Deiyai;
- 4) pengembangan pendidikan kesetaraan paket A, paket B, dan paket C;
- 5) penyelenggaraan sekolah satu atap dan pengembangan pendidikan jarak jauh di seluruh daerah tertinggal di wilayah Papua;
- 6) penyediaan beasiswa khususnya bagi siswa yang kurang mampu;
- 7) pemberian kuota khusus beasiswa (beasiswa afirmasi) perguruan tinggi negeri di seluruh daerah tertinggal di wilayah Papua;
- 8) pengembangan kualitas sumber daya manusia dengan peningkatan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui kerja sama teknis dengan beberapa perguruan tinggi;
- 9) pengembangan pendidikan khusus nonformal bagi penduduk asli Papua untuk menjadi simpul tenaga pendidikan atau simpul tenaga kesehatan di daerahnya; dan
- 10) pembangunan lembaga pendidikan untuk mendukung pengembangan komoditas unggulan berupa sekolah kejuruan jurusan agroindustri, pertanian, pariwisata, peternakan, perikanan, dan pertambangan.

e. kriteria ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 30 -

e. Kriteria Sarana dan Prasarana

Mendukung pemenuhan standar pelayanan minimal di kabupaten tertinggal. Strategi dalam mendukung kebijakan percepatan pemenuhan standar pelayanan minimal di kabupaten tertinggal wilayah Papua antara lain dengan melakukan:

- 1) pengembangan sarana dan prasarana jalan terpadu di seluruh kabupaten daerah tertinggal di wilayah Papua;
- 2) percepatan pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan melalui:
  - a) pembangunan sarana dan prasarana serta pelayanan pendidikan yang sesuai dengan karakteristik kampung terisolir di seluruh kabupaten daerah tertinggal;
  - b) pembangunan sekolah, asrama sekolah, sekolah berasrama, atau ruang kelas baru; dan
  - c) penyelenggaraan pelatihan keterampilan dan keahlian profesional di wilayah terisolir dan wilayah perbatasan.
- 3) percepatan pemenuhan sarana dan prasarana kesehatan melalui:
  - a) pembangunan sarana dan prasarana serta pelayanan kesehatan yang sesuai dengan karakteristik kampung terisolir di wilayah pegunungan dan wilayah terisolir lainnya;
  - b) pengadaan sarana kesehatan keliling di seluruh daerah tertinggal terutama Sorong Selatan dan Teluk Wondama;
  - c) pengembangan fasilitas rumah sakit pertama terutama yang termasuk Daerah Tertinggal, Perbatasan, dan Kepulauan terluar (DTPK);
  - d) pengadaan ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 31 -

- d) pengadaan dan pemerataan tenaga kesehatan, peningkatan kapasitas, dan pemberian tunjangan khusus bagi tenaga kesehatan di seluruh daerah tertinggal terutama di Kabupaten Deiyai, Puncak Jaya, Paniai, Tolikara, Lanny Jaya, Dogiyai, Puncak, Nduga, Nabire, Maybrat, Asmat, dan Jayawijaya; dan
  - e) percepatan pemenuhan kebutuhan elektrifikasi terutama di seluruh wilayah yang belum terlistriki terutama Kabupaten Intan Jaya, Nduga, Lanny Jaya, Tolikara, Yahukimo, Puncak Jaya, Pegunungan Bintang, dan Asmat.
- 4) pembangunan sarana dan prasarana pasar untuk mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat terutama di Kabupaten Tolikara, Yahukimo, Jayawijaya, Puncak Jaya, Yalimo, Biak Numfor, Nduga, Teluk Bintuni, Asmat, Merauke, dan Mappi;
- 5) percepatan pemenuhan sarana dan prasarana informasi dan telekomunikasi melalui:
- a) penyediaan stasiun pemancar atau *Base Transceiver Station* (BTS) di wilayah nirsinyal (*blankspot*) layanan telekomunikasi;
  - b) penyediaan akses jaringan internet; dan
  - c) penyediaan infrastruktur penyiaran publik dan peningkatan jangkauan siaran melalui revitalisasi infrastruktur penyiaran publik.
- 6) percepatan sarana dan prasarana sumber daya air untuk pelayanan dasar publik, melalui:
- a) pengembangan sarana prasarana pembangunan sumur air dalam di daerah sulit air dan pembangunan sumber air permukaan;
  - b) penyediaan ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 32 -

- b) penyediaan sumber daya air untuk memenuhi kebutuhan air baku untuk keperluan air minum, industri, usaha pertanian pangan dan perkebunan;
  - c) peningkatan kualitas jaringan dan keterpaduan sistem jaringan sumber daya air; dan
  - d) pembangunan sarana dan prasarana air bersih sehat di seluruh kampung, terutama di wilayah terisolir dan perbatasan.
- 7) pembangunan perumahan layak huni, khususnya di wilayah terisolir dan perbatasan; dan
- 8) perbaikan lingkungan permukiman tidak layak huni, khususnya di wilayah pegunungan tengah dan kawasan perbatasan.
- f. Kriteria Kemampuan Keuangan Daerah
- Strategi untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah di seluruh daerah tertinggal melalui:
- 1) penguatan kapasitas dan kelembagaan daerah dalam rangka penerapan prinsip pemerintahan yang baik (*Good Governance*);
  - 2) penguatan kapasitas pemerintah daerah dalam meningkatkan iklim investasi yang kondusif;
  - 3) meningkatkan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) baru dan potensi penerimaan daerah yang bersumber dari penerimaan lain yang sah; dan
  - 4) memperbaiki sistem penerimaan pajak dan retribusi.

g. Karakteristik ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 33 -

g. Kriteria Karakteristik Daerah

Strategi untuk menciptakan pembangunan kabupaten tertinggal yang juga memperhatikan kriteria karakteristik daerah dan mendukung kebijakan pengembangan wilayah berbasis kampung adat di kabupaten tertinggal di wilayah Papua terutama di Kabupaten Teluk Wondama, Dogiyai, Waropen, Yalimo, Paniai, Nabire, Sorong Selatan, Intan Jaya, Teluk Bintuni, Supiori, dan Asmat, antara lain dengan melakukan:

- 1) pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana mitigasi bencana berdasarkan karakteristik daerah;
- 2) pengelolaan hutan kemasyarakatan sesuai dengan potensi kearifan lokal;
- 3) pemberdayaan komunitas adat atau masyarakat adat untuk mewujudkan keamanan, pencegahan, dan penyelesaian konflik; dan
- 4) rekonsiliasi komunitas atau masyarakat yang melibatkan tokoh masyarakat dan tokoh agama di daerah pasca konflik.

B. Percepatan ...



PRESIDEN  
REPUBLIC INDONESIA

- 34 -

B. Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal di Wilayah Maluku

1. Penyebab Utama Ketertinggalan di Wilayah Maluku

Berdasarkan analisis indeks ketertinggalan pada 21 (dua puluh satu) kabupaten kota sebesar 82,35% (delapan puluh dua koma tiga puluh lima persen) di wilayah Maluku, terdapat 14 (empat belas) kabupaten sebesar 66,67% (enam puluh enam koma enam puluh tujuh persen) dikategorikan tertinggal dan 7 (tujuh) kabupaten tidak tertinggal sebesar 33,33% (tiga puluh tiga koma tiga puluh tiga persen). Lokasi kabupaten tertinggal dan penyebab utama ketertinggalan yang terdapat di wilayah Maluku sebagaimana ditunjukkan dalam Tabel 3.3 berikut ini.

Tabel 3.3

Daftar Kabupaten Tertinggal dan Penyebab Utama Ketertinggalan  
Wilayah Maluku Tahun 2015-2019

No.	Kabupaten	Provinsi	Penyebab Utama Ketertinggalan Menurut Urutan					
			1	2	3	4	5	6
1.	Maluku Tenggara Barat	Maluku	Ekonomi	Aksesibilitas	Kemampuan Keuangan Daerah	Sumber Daya Manusia	-	-
2.	Maluku Tengah		Aksesibilitas	Ekonomi	Karakteristik Daerah	Kemampuan Keuangan Daerah	-	-
3.	Buru		Ekonomi	Karakteristik Daerah	Kemampuan Keuangan Daerah	Aksesibilitas	Sarana dan Prasarana	-
4.	Kepulauan Aru		Ekonomi	Aksesibilitas	Kemampuan Keuangan Daerah	Karakteristik Daerah	Sarana dan Prasarana	-
5.	Seram Bagian Barat		Ekonomi	Kemampuan Keuangan Daerah	Karakteristik Daerah	Sarana dan Prasarana	Aksesibilitas	-
6.	Seram Bagian Timur		Ekonomi	Aksesibilitas	Kemampuan Keuangan Daerah	Sarana dan Prasarana	Sumber Daya Manusia	Karakteristik Daerah
7.	Maluku Barat Daya		Aksesibilitas	Ekonomi	Sumber Daya Manusia	Sarana dan Prasarana	Kemampuan Keuangan Daerah	Karakteristik Daerah
8.	Buru Selatan		Aksesibilitas	Kemampuan Keuangan Daerah	Sarana dan Prasarana	Sumber Daya Manusia	Karakteristik Daerah	-
9.	Halmahera Barat	Maluku Utara	Karakteristik Daerah	Sumber Daya Manusia	Kemampuan Keuangan Daerah	Ekonomi	Sarana dan Prasarana	-
10.	Kepulauan Sula		Kemampuan Keuangan Daerah	Karakteristik Daerah	Sarana dan Prasarana	Ekonomi	Sumber Daya Manusia	-



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 35 -

11.	Halmahera Selatan		Aksesibilitas	Karakteristik Daerah	Sumber Daya Manusia	Sarana dan Prasarana	Kemampuan Keuangan Daerah	-
12.	Halmahera Timur		Ekonomi	Karakteristik Daerah	Aksesibilitas	Sumber Daya Manusia	Kemampuan Keuangan Daerah	-
13.	Pulau Morotai		Ekonomi	Karakteristik Daerah	Sumber Daya Manusia	Kemampuan Keuangan Daerah	-	-
14.	Pulau Taliabu		Kemampuan Keuangan Daerah	Karakteristik Daerah	Ekonomi	Sarana dan Prasarana	Aksesibilitas	Sumber Daya Manusia

## 2. Potensi dan Keterkaitan Wilayah

Wilayah Maluku merupakan lumbung ikan nasional di Indonesia. Peran wilayah Maluku dalam hal sumber daya alam nasional didasarkan atas potensi dari sumber daya perikanan terutama perikanan tangkap dan perikanan laut. Persentase kenaikan produksi perikanan tangkap merupakan yang terbesar di Indonesia, begitu pula dengan produksi perikanan laut menduduki peringkat ke-5 (lima) terbesar.

Dalam rangka mengembangkan sektor primer yang merupakan sektor basis di seluruh daerah tertinggal di wilayah Maluku, diperlukan pengembangan potensi wilayah dari aspek hulu dan hilir secara terintegrasi, antara lain melalui pengembangan agroindustri. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah dan diharapkan dapat mentransformasikan struktur ekonomi wilayah dari pertanian ke industri dengan berbasis pada agroindustri. Hilirisasi dari pengolahan potensi unggulan berorientasi pada keterkaitan daerah tertinggal dengan daerah pusat pertumbuhan lainnya.

Adapun pengembangan wilayah melalui keterkaitan sektor (hilirisasi komoditi unggulan) dan interaksi spasial (keterkaitan daerah tertinggal dengan daerah pusat pertumbuhan lainnya) di wilayah Maluku sebagaimana terdapat dalam peta sebaran daerah tertinggal dan pusat pertumbuhan di wilayah Maluku pada Gambar 2 berikut ini.

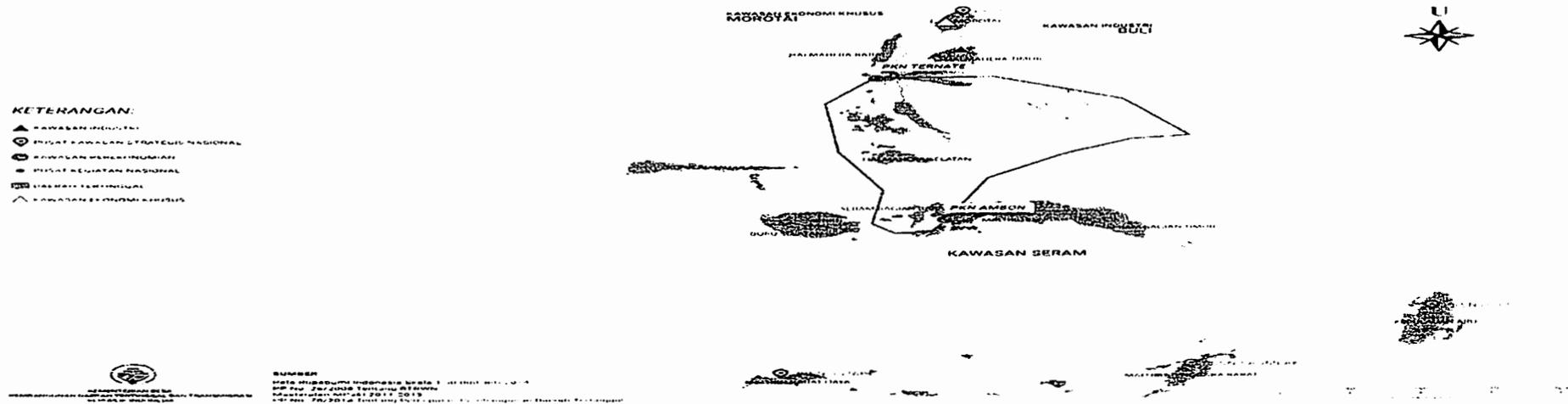
Gambar 2 ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 36 -

Gambar 2  
Peta Sebaran Daerah Tertinggal dan Pusat Pertumbuhan di Wilayah Maluku



Pengembangan ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 37 -

Pengembangan sektor unggulan di daerah tertinggal dan kawasan perbatasan di wilayah Maluku (Pusat Kawasan Strategis Nasional Morotai, Pusat Kawasan Strategis Nasional Ilwaki, Pusat Kawasan Strategis Nasional Saumlaki, dan Pusat Kawasan Strategis Nasional Dobo) dilakukan melalui peningkatan produktivitas di hulu dan percepatan industrialisasi/hilirisasi sektor perkebunan, pangan, hortikultura, perikanan laut, pengolahan hasil-hasil laut, dan kepariwisataan bahari dan sosial-budaya.

Untuk menunjang pengembangan sektor unggulan di atas, diperlukan pengembangan ekonomi wilayah secara terintegrasi dari aspek hulu dan hilir (keterkaitan sektor) dengan meningkatkan konektivitas antara daerah pinggiran, seperti daerah tertinggal dan kawasan perbatasan ke pusat pertumbuhan/kawasan strategis yakni dengan Kawasan Seram, Kawasan Industri Buli, dan Kawasan Ekonomi Khusus Morotai. Selanjutnya orientasi pengembangan produk unggulan tersebut menuju jalur pemasaran wilayah yakni ke Pusat Kegiatan Nasional Ambon dan Pusat Kegiatan Nasional Ternate.

3. Sasaran Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal di Wilayah Maluku

Sasaran pengembangan wilayah Maluku sampai dengan tahun 2019 sebagaimana ditunjukkan dalam Tabel 3.4 berikut ini.

Tabel 3.4 ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 38 -

Tabel 3.4  
Tabel Sasaran Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal di Wilayah Maluku

Sasaran	Tahun Dasar	Target					KELUARAN JANGKA MENENGAH	Tahun Dasar	Target					KELUARAN JANGKA PENDEK	Tahun Dasar	Target				
	2014	2015*	2016	2017	2018	2019		2014	2015*	2016	2017	2018	2019		2014	2015*	2016	2017	2018	2019
Meningkatnya IPM di Daerah Tertinggal	61,13	61,79	62,40	63,04	63,67	64,30	Kesehatan (Angka Harapan Hidup)	63,22	63,48	63,74	64,00	64,26	64,52	Jumlah Dokter per 1000 Penduduk (Persentase)	0,29**	0,30	0,31	0,35	0,39	0,42
							Harapan Lama Sekolah (tahun)	11,79	12,02	12,25	12,50	12,75	13,01	Angka Partisipasi Sekolah Menengah Pertama (Persentase)	94,92	95,99	95,88	96,58	96,93	97,29
							Standar hidup layak (Pendapatan Nasional Bruto Perkapita) (Ribuan rupiah per tahun)	7,11	7,23	7,36	7,49	7,63	7,78	Angka Partisipasi Sekolah Menengah Atas (Persentase)	74,25	71,99	73,08	75,55	76,78	78,02

Meningkatnya ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 39 -

Meningkatnya Laju Petumbuhan Ekonomi di Daerah Tertinggal (Persentase)	5,22	5,45	5,69	5,86	6,03	6,37	Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja (Produk Domestik Regional Bruto/Tenaga Kerja) (Juta/orang/tahun)	32,27	34,00	35,90	36,67	38,74	41,06	Peningkatan persentase desa dengan ketersediaan jalan memadai (jalan aspal) (Persentase)	39,81**	40,36	43,51	46,67	49,82	52,97
Penurunan Persentase Penduduk Miskin (Persentase)	17,43	18,08	17,45	16,81	16,17	15,53	Penurunan Persentase Penduduk Miskin (Garis Kemiskinan) (Rp/kapita/bulan)	4.025.031	4.590.882	5.010.090	5.469.582	5.973.407	6.526.034	Peningkatan persentase rumah tangga pengguna listrik & air bersih (Utilitas) (Persentase)	62,31	63,23	64,15	64,88	65,61	67,08

et:

Sumber: BPS (Podes 2014, Susenas 2015) data diolah Dit. PIDT KDPDPT, 2017

Realisasi

\* Data Podes 2014

4. Arah ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 40 -

4. Arah Kebijakan Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal di Wilayah Maluku

Arah kebijakan percepatan pembangunan daerah tertinggal difokuskan pada promosi potensi daerah tertinggal untuk mempercepat pembangunan dan pengembangan kemitraan untuk mempercepat pembangunan dan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan daerah, pemenuhan kebutuhan dasar dan pelayanan dasar publik, pengembangan perekonomian masyarakat yang berbasis potensi lokal yaitu pengembangan pangan, perikanan, energi dan pertambangan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan pembangunan infrastruktur penunjang konektivitas antara daerah pinggiran, seperti daerah tertinggal dan kawasan perbatasan ke pusat pertumbuhan.

5. Strategi Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal di Wilayah Maluku

a. Kriteria Perekonomian Masyarakat

Strategi untuk mendukung pengembangan perekonomian daerah tertinggal di wilayah Maluku berbasis komoditas unggulan lokal di bidang pertanian, perkebunan, perikanan, dan pertambangan antara lain:

1) strategi peningkatan promosi potensi unggulan daerah tertinggal di wilayah Maluku di bidang pertanian, perkebunan, perikanan, dan pariwisata melalui:

a) promosi komoditas unggulan yang merupakan bahan mentah kepada investor dalam rangka meningkatkan pengelolaan bahan mentah menjadi bahan setengah jadi dan bahan jadi sehingga menghasilkan nilai tambah bagi masyarakat lokal di semua kabupaten yang meliputi komoditas padi (Halmahera Timur), industri pengolahan kedelai di Kabupaten Maluku Tenggara, Seram Bagian Barat, dan Seram Bagian Timur, industri pengolahan pala dan cengkeh di Kabupaten Maluku Tengah, Seram Bagian Timur, Halmahera Tengah, Halmahera Timur, dan Buru Selatan; dan

b) Promosi ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 41 -

- b) Promosi investasi, penataan kawasan pariwisata dan peningkatan amenities pariwisata yang berbasis ekowisata, pariwisata budaya, dan pariwisata bahari.
- 2) mengembangkan kawasan perikanan dan kelautan sebagai lumbung ikan nasional yang berkelanjutan terutama di Kabupaten Pulau Morotai, Seram Bagian Barat, Namrole, dan Klishatu di Maluku Barat Daya melalui:
- a) pengembangan sentra industri pengolahan hasil perikanan; dan
  - b) pengembangan dan rehabilitasi kawasan perikanan tangkap dan perikanan budidaya sebagai kawasan minapolitan.
- 3) pengentasan kemiskinan dan pengembangan usaha masyarakat desa kabupaten tertinggal di wilayah Maluku, termasuk pemukiman transmigrasi yang dilakukan dengan:
- a) memberikan dukungan bagi masyarakat miskin melalui penyediaan lapangan usaha, dana bergulir, dan jaminan sosial bagi masyarakat desa;
  - b) revitalisasi dan penguatan peran lembaga lokal dalam memberdayakan masyarakat miskin dan rentan;
  - c) memberikan jaminan terhadap pasokan energi bagi kegiatan ekonomi nelayan dan bantuan permodalan khususnya bagi nelayan;
  - d) meningkatkan keberdayaan petani dan nelayan dalam memanfaatkan teknologi;
  - e) mengembangkan komoditas pertanian tanaman lokal seperti padi, sagu, jagung, dan rumput laut; dan
  - f) rehabilitasi, revitalisasi dan pengembangan jaringan irigasi, dan pembangunan embung.

4) perwujudan ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 42 -

4) perwujudan keterkaitan antara kegiatan ekonomi hulu dan hilir desa dan kota melalui pengembangan klaster khususnya agropolitan, minapolitan, pariwisata, dan transmigrasi melalui:

- a) pengembangan sentra produksi dan industri pengolahan hasil pertanian di Kawasan Maba (Kabupaten Halmahera Timur), berupa padi, jagung, kakao dan Kawasan Bula (Kabupaten Seram Bagian Timur) berupa cengkeh, palawija, dan kakao di Kawasan Daruba (Kabupaten Pulau Morotai);
- b) pengembangan budidaya kelautan di Kabupaten Pulau Morotai berbasis komoditi unggulan perikanan dan rumput laut;
- c) pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) dan lembaga pendukung ekonomi lainnya untuk mendukung pengembangan potensi produk unggulan daerah dan pembiayaan usaha pertanian dan perikanan di semua kabupaten tertinggal di wilayah Maluku; dan
- d) pengembangan teknologi berbasis pertanian dan perikanan atau kelautan rakyat yang mendukung penerapan teknologi dan inovasi untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing industri pengolahan dan jasa.

b. Kriteria Peningkatan Aksesibilitas

Strategi dalam mendukung kebijakan peningkatan aksesibilitas yang menghubungkan antara daerah tertinggal dengan pusat pertumbuhan dan pusat pemerintahan dengan strategi antara lain:

1) pengembangan ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 43 -

- 1) pengembangan pelabuhan perikanan di Maluku meliputi Amahai (Maluku Tengah), Kayeli (Buru), Ukurlarang (Maluku Tenggara Barat), Klishatu dan Wetar (Maluku Barat Daya), Kalar-kalar dan Pelabuhan Perikanan Pantai Dobo (Kepulauan Aru), Tamher Timur (Seram Bagian Timur), Piru (Seram Bagian Barat), Pelabuhan Perikanan di Maluku Utara (Pulau Morotai), dan pembangunan jalan dan jembatan Trans Maluku yang meliputi Kabupaten Seram Bagian Barat, Seram Bagian Timur dan Pulau Morotai;
  - 2) peningkatan konektivitas wilayah Maluku sebagai wilayah kepulauan dengan mendukung pengembangan jaringan lintas wilayah antara lain melalui pengembangan Pelabuhan Pulau Teor (Seram Bagian Timur), Wonreli (Maluku Barat Daya), dan Tutu Kembong (Maluku Tenggara Barat) di Provinsi Maluku;
  - 3) pengembangan pelabuhan feri untuk mendukung jalur operasional trans-Maluku di Kabupaten Seram Bagian Barat dan Maluku Tengah; dan
  - 4) pengembangan bandar udara perintis di kawasan kepulauan dan perbatasan terutama di Bandar Udara Tapa dan Moa (Maluku Barat Daya), Amahai (Maluku Tengah), Liwur Bunga dan Saumlaki Baru (Maluku Tenggara Barat), Namrole (Buru Selatan), Emmalamo (Kepulauan Sula), Dobo (Kepulauan Aru), dan Labuha (Halmahera Selatan).
- c. Kriteria Kemampuan Keuangan Daerah
- Strategi dalam meningkatkan kemampuan keuangan daerah di daerah tertinggal terutama di Kabupaten Halmahera Barat, Buru Selatan, Buru, Seram Bagian Barat, Maluku Tenggara Barat, Pulau Morotai, Kepulauan Sula, Pulau Taliabu, Kepulauan Aru, Seram Bagian Timur, Maluku Barat Daya, Maluku Tengah, Halmahera Timur, dan Halmahera Selatan antara lain:

1) penguatan ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 44 -

- 1) penguatan kapasitas dan kelembagaan daerah dalam rangka penerapan prinsip pemerintahan yang baik;
- 2) penguatan kapasitas pemerintah daerah dalam meningkatkan iklim investasi yang kondusif;
- 3) meningkatkan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) baru dan potensi penerimaan daerah yang bersumber dari penerimaan lain yang sah; dan
- 4) memperbaiki sistem penerimaan pajak dan retribusi.

d. Kriteria Karakteristik Daerah

Strategi untuk menciptakan pembangunan kabupaten tertinggal yang juga memperhatikan kriteria karakteristik daerah dan mendukung kebijakan pengembangan wilayah Maluku antara lain:

- 1) penguatan kapasitas kelembagaan dan aparatur penanggulangan bencana di pusat dan daerah, diantaranya melalui penyediaan prasarana kantor/gedung penanggulangan bencana daerah;
- 2) penyediaan sistem peringatan dini bencana tsunami, letusan gunung api, longsor, dan banjir serta memastikan berfungsinya sistem peringatan dini dengan baik;
- 3) mengembangkan dan merehabilitasi sarana dan prasarana yang adaptif terhadap dampak bencana tanah longsor, gelombang pasang, banjir, letusan gunung berapi, gempa bumi, dan tsunami;
- 4) peningkatan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan konservasi;
- 5) melestarikan kawasan suaka alam dan pelestarian alam dalam kesatuan gugus pulau;
- 6) penyediaan infrastruktur mitigasi dan kesiapsiagaan (tempat evakuasi sementara, jalur evakuasi dan rambu evakuasi) menghadapi bencana gempa bumi, tsunami, dan letusan gunung api;

7) pengurangan ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 45 -

- 7) pengurangan risiko bencana berbasis komunitas melalui pengembangan desa tangguh bencana; dan
  - 8) peningkatan kapasitas manajemen dan pendistribusian logistik kebencanaan.
- e. Kriteria Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia
- Strategi dalam mendukung kebijakan peningkatan kualitas sumber daya manusia daerah tertinggal antara lain:
- 1) pelatihan dan pendampingan masyarakat dalam rangka meningkatkan nilai tambah sesuai dengan karakteristik dan produk unggulan daerah, posisi strategis dan keterkaitan antarkawasan;
  - 2) pengembangan sarana dan prasarana pendidikan dan tenaga terampil untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja, khususnya di bidang perikanan, perkebunan, perdagangan, dan logistik;
  - 3) pemerataan distribusi, peningkatan kapasitas, dan pemberian tunjangan bagi tenaga pendidik di seluruh daerah tertinggal terutama Buru, Halmahera Selatan, Kepulauan Sula, Maluku Tenggara Barat, Maluku Tengah, dan Pulau Morotai;
  - 4) pengembangan sekolah kecil untuk daerah terpencil dengan jumlah penduduk sedikit, diutamakan di Pulau Morotai, Kabupaten Aru, Kabupaten Maluku Barat Daya, dan Maluku Tenggara Barat;
  - 5) pengembangan pendidikan kesetaraan paket A, paket B, dan paket C;
  - 6) pemberian kuota khusus beasiswa perguruan tinggi (beasiswa afirmasi) untuk kabupaten tertinggal;
  - 7) pemberdayaan masyarakat sebagai kader kesehatan di setiap desa; dan
  - 8) pemerataan pelayanan kesehatan, obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai (BMHP).

f. Kriteria ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 46 -

f. Kriteria Sarana dan Prasarana

Pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana untuk mendukung pemenuhan standar pelayanan minimal di daerah tertinggal dilakukan sebagai berikut:

- 1) pengembangan jaringan jalan yang terpadu dengan jaringan transportasi penyeberangan, pelabuhan, dan bandar udara berbasis gugus pulau di seluruh kabupaten daerah tertinggal di wilayah Maluku;
- 2) percepatan pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan melalui:
  - a) penyelenggaraan sekolah satu atap di wilayah kepulauan; dan
  - b) pembangunan sekolah, asrama sekolah, sekolah berasrama, atau ruang kelas baru;
- 3) percepatan pemenuhan sarana prasarana kesehatan melalui:
  - a) pembangunan, rehabilitasi, dan peningkatan sarana dan prasarana serta pelayanan kesehatan yang sesuai dengan karakteristik daerah tertinggal;
  - b) pengadaan sarana kesehatan keliling, pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas) terapung dan rumah sakit terapung;
  - c) pengembangan fasilitas rumah sakit umum daerah pratama terutama di Kepulauan Aru dan Halmahera Tengah; dan
  - d) pengadaan dan pemerataan tenaga kesehatan, peningkatan kapasitas, dan pemberian tunjangan khusus bagi tenaga kesehatan di seluruh daerah tertinggal terutama di Kepulauan Aru, Maluku Tengah, Maluku Barat Daya, dan Maluku Tenggara Barat.

4) pembangunan ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 47 -

- 4) pembangunan sarana dan prasarana pasar untuk mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat pasar di Kabupaten Halmahera Selatan, Halmahera Barat, Maluku Tengah, dan Seram Bagian Timur;
- 5) percepatan pemenuhan kebutuhan elektrifikasi terutama di seluruh wilayah yang belum terlistriki;
- 6) percepatan pemenuhan sarana dan prasarana informasi dan telekomunikasi melalui:
  - a) penyediaan stasiun pemancar atau *Base Transceiver Station* (BTS) di wilayah nir sinyal (*blankspot*) layanan telekomunikasi;
  - b) penyediaan akses pita lebar (*broadband*) internet; dan
  - c) penyediaan infrastruktur penyiaran publik dan peningkatan jangkauan siaran melalui revitalisasi infrastruktur penyiaran publik;
- 7) percepatan sarana dan prasarana sumber daya air untuk pelayanan dasar publik, melalui:
  - a) pengembangan sarana dan prasarana pembangunan sumur air dalam di daerah sulit air dan pembangunan sumber air permukaan;
  - b) penyediaan sumber daya air untuk memenuhi kebutuhan air baku untuk keperluan pengairan, air minum, industri, usaha pertanian pangan dan perkebunan;
  - c) peningkatan kualitas jaringan dan keterpaduan sistem jaringan sumber daya air; dan
  - d) pembangunan sarana dan prasarana air bersih sehat di seluruh kampung, terutama di wilayah terisolir dan perbatasan.

C. Percepatan ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 48 -

C. Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal di Wilayah Nusa Tenggara

1. Penyebab Utama Ketertinggalan Daerah di Wilayah Nusa Tenggara

Berdasarkan analisis indeks ketertinggalan pada 33 (tiga puluh tiga) kabupaten/kota di wilayah Nusa Tenggara terdapat 26 kabupaten 78,79% (tujuh puluh delapan koma tujuh puluh sembilan persen) yang dikategorikan tertinggal dan 7 (tujuh) kabupaten/kota 21,21% (dua puluh satu koma dua puluh satu persen) tidak tertinggal. Daftar kabupaten tertinggal dan penyebab utama ketertinggalan di wilayah Nusa Tenggara akan ditunjukkan dalam Tabel 3.5 berikut ini.

Tabel 3.5  
Daftar Kabupaten Tertinggal dan Penyebab Utama Ketertinggalan  
di Wilayah Nusa Tenggara Tahun 2015-2019

No.	Kabupaten	Provinsi	Penyebab Utama Ketertinggalan Menurut Urutan					
			1	2	3	4	5	6
1	Lombok Barat	Nusa Tenggara Barat	Sumber Daya Manusia	Sarana dan Prasarana	Kemampuan Keuangan Daerah	-	-	-
2	Lombok Tengah		Sumber Daya Manusia	Sarana dan Prasarana	Kemampuan Keuangan Daerah	-	-	-
3	Lombok Timur		Sumber Daya Manusia	Sarana dan Prasarana	Kemampuan Keuangan Daerah	Ekonomi	-	-
4	Sumbawa		Sumber Daya Manusia	Kemampuan Keuangan Daerah	-	-	-	-
5	Dompu		Sumber Daya Manusia	Karakteristik Daerah	Kemampuan Keuangan Daerah	-	-	-
6	Bima		Sumber Daya Manusia	Karakteristik Daerah	Kemampuan Keuangan Daerah	Sarana dan Prasarana	Ekonomi	-
7	Sumbawa Barat		Sumber Daya Manusia	Kemampuan Keuangan Daerah	Karakteristik Daerah	-	-	-
8	Lombok Utara		Sumber Daya Manusia	Ekonomi	Karakteristik Daerah	Kemampuan Keuangan Daerah	Sarana dan Prasarana	-
9	Sumba Barat	Nusa Tenggara Timur	Ekonomi	Sumber Daya Manusia	Sarana dan Prasarana	Kemampuan Keuangan Daerah	-	-
10	Sumba Timur		Sumber Daya Manusia	Ekonomi	Karakteristik Daerah	Sarana dan Prasarana	Kemampuan Keuangan Daerah	Aksesibilitas
11	Kupang		Ekonomi	Sumber Daya Manusia	Karakteristik Daerah	Kemampuan Keuangan Daerah	Sarana dan Prasarana	-
12	Timor Tengah Selatan		Ekonomi	Sarana dan Prasarana	Sumber Daya Manusia	Kemampuan Keuangan Daerah	Aksesibilitas	Karakteristik Daerah
13	Timor Tengah Utara		Ekonomi	Kemampuan Keuangan Daerah	Karakteristik Daerah	-	-	-
14	Belu		Sumber Daya Manusia	Karakteristik Daerah	Kemampuan Keuangan Daerah	Ekonomi	Sarana dan Prasarana	-



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 49 -

No.	Kabupaten	Provinsi	Penyebab Utama Keteringgalan Menurut Urutan					
			1	2	3	4	5	6
15	Alor	Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ekonomi	Kemampuan Keuangan Daerah	Sarana dan Prasarana	Karakteristik Daerah	Aksesibilitas	-
16	Lembata		Ekonomi	Karakteristik Daerah	Kemampuan Keuangan Daerah	Sumber Daya Manusia	-	-
17	Ende		Ekonomi	Sumber Daya Manusia	Kemampuan Keuangan Daerah	Karakteristik Daerah	-	-
18	Manggarai		Ekonomi	Karakteristik Daerah	Kemampuan Keuangan Daerah	Sarana dan Prasarana	Sumber Daya Manusia	-
19	Rote Ndao		Ekonomi	Kemampuan Keuangan Daerah	Sarana dan Prasarana	Sumber Daya Manusia	-	-
20	Manggarai Barat		Ekonomi	Sumber Daya Manusia	Kemampuan Keuangan Daerah	Aksesibilitas	Karakteristik Daerah	Sarana dan Prasarana
21	Sumba Tengah		Sumber Daya Manusia	Ekonomi	Kemampuan Keuangan Daerah	Sarana dan Prasarana	-	-
22	Sumba Barat Daya		Sumber Daya Manusia	Ekonomi	Sarana dan Prasarana	Kemampuan Keuangan Daerah	-	-
23	Nagekco		Sumber Daya Manusia	Kemampuan Keuangan Daerah	Karakteristik Daerah	Ekonomi	-	-
24	Manggarai Timur		Ekonomi	Sarana dan Prasarana	Kemampuan Keuangan Daerah	Sumber Daya Manusia	Karakteristik Daerah	-
25	Sabu Raijua	Ekonomi	Sarana dan Prasarana	Sumber Daya Manusia	Kemampuan Keuangan Daerah	-	-	
26	Malaka	Sumber Daya Manusia	Kemampuan Keuangan Daerah	Ekonomi	Sarana dan Prasarana	Karakteristik Daerah	-	

## 2. Potensi dan Keterkaitan Wilayah

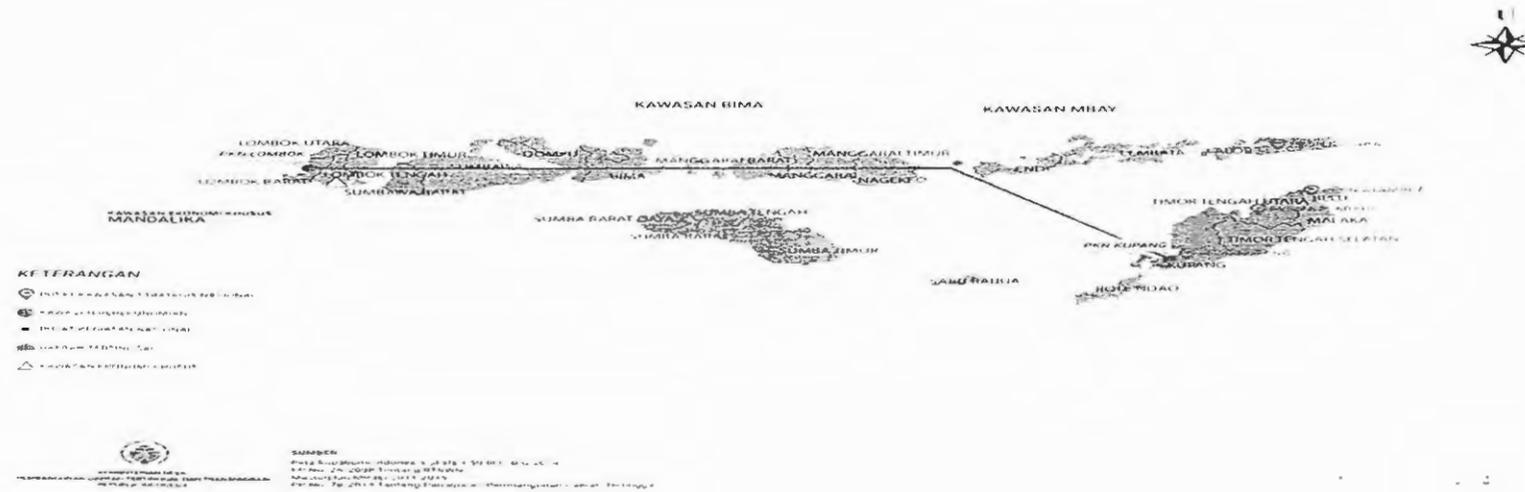
Pengembangan sektor unggulan di daerah tertinggal dan kawasan perbatasan antara lain melalui peningkatan produktivitas di hulu dan percepatan industrialisasi/hilirisasi untuk mendukung pintu gerbang pariwisata alam dan budaya melalui pengembangan industri pertemuan, insentif, konvensi, dan pameran (*Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition*) penopang pangan nasional dengan percepatan pembangunan perekonomian berbasis maritim (kelautan) melalui pengembangan industri perikanan dan kelautan, pengembangan industri berbasis peternakan sapi dan perkebunan jagung, pengembangan industri mangan dan tembaga, pengembangan industri pariwisata alam dan bahari, dan pengembangan industri sosial dan budaya.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 50 -

Gambar 3  
Peta Sebaran Daerah Tertinggal dan Pusat Pertumbuhan di Wilayah Nusa Tenggara



Untuk ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 51 -

Untuk menunjang pengembangan sektor unggulan, diperlukan pengembangan ekonomi wilayah secara terintegrasi dari aspek hulu dan hilir (keterkaitan sektor) dengan meningkatkan konektivitas antara daerah pinggiran, seperti daerah tertinggal dan kawasan perbatasan ke pusat pertumbuhan/kawasan strategis yakni Kawasan Mbay, Kawasan Bima, dan Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika. Selanjutnya orientasi pengembangan produk unggulan tersebut menuju gerai pemasaran wilayah yakni ke Pusat Kegiatan Nasional Kupang dan Pusat Kegiatan Nasional Lombok.

3. Sasaran Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Wilayah Nusa Tenggara

Sasaran pengembangan wilayah Nusa Tenggara sampai dengan tahun 2019 sebagaimana ditunjukkan dalam Tabel 3.6 berikut ini.

Tabel 3.6 ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 52 -

Tabel 3.6  
Sasaran Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal di Wilayah Nusa Tenggara

Sasaran	Tahun Dasar	Target					KELUARAN JANGKA MENENGAH	Tahun Dasar	Target					KELUARAN JANGKA PENDEK	Tahun Dasar	Target				
	2014	2015*	2016	2017	2018	2019		2014	2015*	2016	2017	2018	2019		2014	2015*	2016	2017	2018	2019
Meningkatnya IPM di Daerah Tertinggal	60,63	61,30	61,94	62,60	63,24	63,89	Kesehatan (Angka Harapan Hidup)	64,59	64,86	65,14	65,42	65,70	65,98	Jumlah Dokter per 1000 Penduduk (Persentase)	0,14**	0,14	0,15	0,16	0,17	0,18
							Harapan Lama Sekolah (tahun)	12,07	12,30	12,54	12,78	13,03	13,28	Angka Partisipasi Sekolah Menengah Pertama (Persentase)	95,79	95,27	95,31	96,40	96,94	97,48
							Standar hidup layak (Pendapatan Nasional Bruto Perkapita) (Ribu rupiah per tahun)	7,07	7,19	7,33	7,48	7,62	7,78	Angka Partisipasi Sekolah Menengah Atas (Persentase)	74,91	74,65	74,46	77,52	79,05	80,58

Meningkatnya ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 53 -

Meningkatnya Laju Petumbuhan Ekonomi di Daerah Tertinggal (Persentase)	4,53	17,04	5,13	5,21	5,29	5,45	Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja (Produk Domestik Regional Bruto/Tenaga Kerja) (Juta/orang/tahun)	27,66	32,37	34,03	35,54	37,41	39,44	Peningkatan persentase desa dengan ketersediaan jalan memadai (jalan aspal) (Persentase)	51,77**	55,78	57,53	59,27	61,00	62,47
Penurunan Persentase Penduduk Miskin (Persentase)	21,22	23,74	23,12	22,50	21,87	21,25	Penurunan Persentase Penduduk Miskin (Garis Kemiskinan) (Rp/kapita/bulan)	6.984.997	7.508.972	8.138.140	8.822.627	9.567.478	10.378.214	Peningkatan persentase rumah tangga pengguna listrik & air bersih (Utilitas) (Persentase)	65,25	66,97	68,68	70,15	71,61	74,53

Ket:

\* Realisasi

\*\* Data Podes 2014

Sumber: BPS (Podes 2014, Susenas 2015) data diolah Dit. PIDT KDPDIT, 2017

4. Arah ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 54 -

4. Arah Kebijakan Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal di Wilayah Nusa Tenggara

Arah kebijakan percepatan pembangunan daerah tertinggal di wilayah Nusa Tenggara difokuskan pada peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas, pengembangan perekonomian masyarakat yang berbasis pengembangan pangan, perikanan, yang didukung oleh sektor energi dan pertambangan, promosi potensi daerah tertinggal untuk mempercepat pembangunan, sehingga terbangun kemitraan dengan banyak pihak dan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan daerah, pemenuhan kebutuhan dasar dan pelayanan dasar publik, dan pembangunan infrastruktur penunjang konektivitas antara daerah pinggiran, seperti daerah tertinggal dan kawasan perbatasan ke pusat pertumbuhan.

5. Strategi Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal di Wilayah Nusa Tenggara

Strategi untuk mendukung pengembangan perekonomian kabupaten tertinggal di wilayah Nusa Tenggara, sesuai dengan 6 (enam) kriteria ketertinggalan yang dikemukakan berikut ini.

a. Kriteria Sumber Daya Manusia

Strategi dalam mendukung kebijakan peningkatan kualitas sumber daya manusia di Nusa Tenggara melalui:

- 1) pengembangan upaya kesehatan berbasis masyarakat melalui pelatihan kepada kader kesehatan;
- 2) pemerataan pelayanan kesehatan, obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai (BMHP);
- 3) pemerataan distribusi tenaga pendidik, peningkatan kapasitas serta pemberian tunjangan tenaga pendidik terutama di wilayah Nusa Tenggara bagian timur dan kawasan perbatasan yakni Kabupaten Sumba Barat Daya, Saburaijua, Sumba Tengah, Sumba Timur, Manggarai Timur, Sumba Barat, Rote Ndao, Timor Tengah Selatan, Belu, Malaka, Manggarai, Manggarai Barat, Timor Tengah Utara, Lembata, dan Nagekeo;

4) penyelenggaraan ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 55 -

- 4) penyelenggaraan guru kunjung terutama di wilayah Nusa Tenggara bagian timur dan kawasan perbatasan yakni Kabupaten Lembata, Alor, Belu, Timor Tengah Utara, Timor Tengah Selatan, Rote Ndao, Malaka, dan Sabu Raijua;
- 5) pengembangan pendidikan jarak jauh;
- 6) pengembangan pendidikan kesetaraan paket A, paket B, dan paket C; dan
- 7) pelatihan dan pendampingan masyarakat dalam rangka meningkatkan nilai tambah sesuai dengan karakteristik dan produk unggulan daerah, posisi strategis dan keterkaitan antarkawasan terutama di Kabupaten Bima, Kupang, Lombok Timur, dan Dompu.

b. Kriteria Perekonomian Masyarakat

Untuk mendukung pengembangan perekonomian kabupaten tertinggal di wilayah Nusa Tenggara berbasis komoditas unggulan lokal dilakukan strategi sebagai berikut:

- 1) pengembangan tanaman pangan berupa jagung terutama di Kabupaten Timor Tengah Utara, Belu, Kupang, Dompu, Timor Tengah Selatan, Belu, Kupang, dan Ende;
- 2) pengembangan potensi perkebunan kopi terutama di Kabupaten Manggarai Timur, dan Ende;
- 3) pengembangan peternakan sapi melalui sapi indukan wajib bunting (SIWAB);
- 4) pembudidayaan madu hutan di Kabupaten Bima, Sumbawa, Belu, Timor Tengah Selatan, dan Timor Tengah Utara;
- 5) pengembangan industri tenun menjadi industri ekonomi kreatif yang bisa mengangkat perekonomian masyarakat;

6) penataan ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 56 -

- 6) penataan kawasan pariwisata, peningkatan amenitas pariwisata serta promosi potensi pariwisata untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisata di wilayah Nusa Tenggara;
  - 7) pengembangan kawasan budidaya perairan untuk budidaya rumput laut terutama di Kabupaten Lombok Timur dan pengembangan usaha garam rakyat terutama di Kabupaten Alor, Bima, Kupang, Lombok Barat, Sumbawa; dan
  - 8) pengembangan industri kecil dan menengah dari hulu ke hilir untuk mendukung sektor unggulan.
- c. Kriteria Kemampuan Keuangan Daerah
- Untuk mendorong pembangunan daerah tertinggal yang memperhatikan aspek karakteristik daerah maka perlu didukung pembiayaan daerah untuk semua kabupaten tertinggal di wilayah Nusa Tenggara yang dilakukan melalui:
- 1) penguatan kapasitas dan kelembagaan daerah dalam rangka penerapan prinsip pemerintahan yang baik (*Good Governance*);
  - 2) koordinasi dan sinkronisasi antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah dan antarsatuan kerja perangkat daerah dalam penyelenggaraan program pembangunan di daerah; dan
  - 3) peningkatan kualitas aparatur terkait pengembangan ekonomi daerah dan ekonomi masyarakat pada perkebunan, pangan hortikultura dan perikanan laut atau pesisir dari aspek perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian.

d. Kriteria ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 57 -

d. Kriteria Sarana dan Prasarana

Strategi dalam mendukung kebijakan percepatan pemenuhan standar pelayanan minimal melalui peningkatan sarana prasarana di daerah tertinggal pada wilayah Nusa Tenggara antara lain sebagai berikut:

- 1) pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur transportasi seperti jalan dan jembatan, khususnya pada kawasan perbatasan dan daerah terisolir di Nusa Tenggara Timur;
- 2) pengembangan jalan penghubung menuju kawasan strategis di Kabupaten Dompu, Lombok Barat, dan Manggarai Barat;
- 3) membangun pasar untuk memfasilitasi pemasaran hasil pertanian, perikanan dan peternakan terutama di Kabupaten Ende, Timor Tengah Selatan, Lombok Timur, Bima, Manggarai Timur, Timor Tengah Utara, Kupang, Manggarai, dan Manggarai Barat;
- 4) pengadaan sarana kesehatan keliling di bagian timur Nusa Tenggara, daerah tertinggal yang kurang fasilitas kesehatannya dan merupakan daerah perbatasan;
- 5) pengadaan pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas) terapung di kawasan pulau kecil terluar;
- 6) pengadaan rumah sakit terapung di kawasan pulau kecil terluar;
- 7) pengembangan fasilitas rumah sakit umum daerah pratama terutama yang termasuk Daerah Tertinggal, Perbatasan, dan Kepulauan terluar (DTPK);
- 8) pemerataan distribusi, peningkatan kapasitas, dan pemberian tunjangan tenaga kesehatan di seluruh daerah tertinggal terutama di Kabupaten Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, Sumbawa, Dompu, Sumbawa Barat, Manggarai, Rote Ndao, dan Sumba Timur;

9) penyelenggaraan ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 58 -

- 9) penyelenggaraan sekolah satu atap di daerah tertinggal dan perbatasan;
  - 10) pembangunan sekolah, asrama sekolah, sekolah berasrama, atau ruang kelas baru;
  - 11) pengembangan elektrifikasi terutama di seluruh wilayah yang belum terlistriki;
  - 12) pembangunan informasi dan telekomunikasi melalui:
    - a) penyediaan infrastruktur penyiaran publik dan peningkatan jangkauan siaran melalui revitalisasi infrastruktur penyiaran publik;
    - b) penyediaan stasiun pemancar atau *Base Transceiver Station* (BTS) di wilayah nirsinyal (*blankspot*) layanan telekomunikasi; dan
    - c) penyediaan akses pita lebar (*broadband*) internet.
  - 13) pembangunan sarana air bersih, sanitasi, irigasi, dan embung terutama di Kabupaten Sumba Barat Daya, Timor Tengah Selatan, Sumba Tengah, Sumba Barat, Sumba Timur, dan Sabu Raijua.
- e. Kriteria Karakteristik Daerah
- Penanganan berbagai karakteristik daerah yang menjadi penyebab ketertinggalan perlu dilakukan untuk mendukung pembangunan di wilayah Nusa Tenggara terutama Kabupaten Lombok Utara, Dompu, Belu, Lembata, Bima, Kupang, Manggarai, Sumba Timur, Sumbawa Barat, Malaka, Alor, dan Timor Tengah Utara dilakukan sebagai berikut:
- 1) penanganan daerah rawan bencana banjir, gempa, tanah longsor, dan bencana lainnya;
  - 2) pemantapan pemanfaatan potensi sumber daya kawasan hutan, dan lahan kritis; dan
  - 3) pemulihan kawasan konflik dengan melakukan:
    - a) pengembangan sistem perlindungan sosial bagi korban konflik;

b) penyelesaian ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 59 -

- b) penyelesaian akar masalah konflik seperti pertanahan, pengangguran dan kemiskinan, serta dampak lain dari konflik;
  - c) peningkatan keberdayaan komunitas untuk mewujudkan keamanan, mencegah, dan menyelesaikan konflik lingkungan; dan
  - d) pengendalian pemanfaatan ruang pada kawasan permukiman dan kampung adat.
- f. Kriteria Aksesibilitas
- Dalam mendukung kebijakan peningkatan aksesibilitas daerah tertinggal di wilayah Nusa Tenggara terutama di Kabupaten Timor Tengah Selatan, Manggarai Barat, Sumba Timur, dan Alor dilakukan strategi sebagai berikut:
- 1) membuka jalur laut untuk mendistribusikan hasil potensi alam supaya bisa dipasarkan ke luar Nusa Tenggara, yaitu di Kabupaten Dompu dengan hasil jagung, Lombok Barat dengan hasil kopi, dan Timor Tengah Selatan dengan hasil jambu mente;
  - 2) percepatan pembangunan sarana prasarana transportasi udara dengan dibangunnya bandar udara perintis yang bisa menghubungkan antarpulau kecil di Nusa Tenggara, pengembangan bandar udara di Lombok dan bandar udara di Bima dengan membuat *master plan* bandar udara, perpanjangan landasan pacu terutama di Kabupaten Alor yakni Mali di Kalabahi dan Kabir di Pulau Pantar, dan Bandar Udara Umbu Mehang Kunda di Kabupaten Sumba Timur, pengembangan Bandar Udara Komodo di Kabupaten Manggarai Barat, pengembangan Bandar Udara Sekongkang di Sumbawa Barat, pengembangan Bandar Udara Haliwen di Atambua (Belu), pemeliharaan bandar udara di Rote Ndao, pengembangan bandar udara baru di Sabu Raijua;

3) pembangunan ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 60 -

- 3) pembangunan ruas jalan darat yang menghubungkan kawasan pariwisata Bangau-Dompu-Raba-Labuan Bajo;
- 4) pengembangan Pelabuhan Waingapu di Kabupaten Sumba Timur sebagai salah satu tempat pengembangan trayek tol laut dan pengembangan Pelabuhan Kolbano di Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- 5) pengembangan dermaga angkutan sungai, danau, dan penyebrangan terutama Pelabuhan Kayangan 2 di Kabupaten Lombok Timur, Pelabuhan Labuan Bajo di Kabupaten Manggarai Barat, Pelabuhan Poto Tano 2 di Sumbawa Barat, Pelabuhan Lembar 4 di Kabupaten Lombok Barat, dermaga Bakalang dan Maritaing di Kabupaten Alor, dermaga Wairiang Kabupaten Lembata, dan dermaga Waikelo Kabupaten Sumba Barat Daya;
- 6) pembangunan dermaga rakyat atau tambatan perahu di Kabupaten Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, Sumbawa, Bima, Sumbawa Barat, Timur Tengah Utara, Belu, Alor, Lembata, Ende, Rote Ndao, Manggarai Barat, Sumba Barat Daya, dan Sabu Raijua;
- 7) pengadaan moda transportasi laut di Kabupaten Lombok Barat, Bima, Lombok Timur, Sumbawa, Lembata, Ende, dan Manggara Barat; dan
- 8) pengadaan moda transportasi darat di Lombok Barat, Sumbawa, Bima, Sumbawa Barat, Timur Tengah Utara, Belu, Alor, Ende, Rote Ndao, Manggara Barat, Sumba Barat Daya, Manggarai Timur, dan Sabu Raijua.

D. Percepatan ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 61 -

D. Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal di Wilayah Sulawesi

1. Penyebab Utama Ketertinggalan di Wilayah Sulawesi

Berdasarkan analisis indeks ketertinggalan pada 81 (delapan puluh satu) kabupaten/kota di wilayah Sulawesi, terdapat 18 (delapan belas) kabupaten sebesar 22,22% (dua puluh dua koma dua puluh dua persen) yang dikategorikan tertinggal dan terdapat 63 (enam puluh tiga) kabupaten/kota sebesar 77,78% (tujuh puluh tujuh koma tujuh puluh delapan persen) yang tidak tertinggal. Daftar kabupaten tertinggal dan penyebab ketertinggalan di wilayah Sulawesi akan ditunjukkan dalam Tabel 3.7 berikut ini.

Tabel 3.7

Daftar Kabupaten Tertinggal dan Penyebab Ketertinggalan  
Wilayah Sulawesi Tahun 2015-2019

No.	Kabupaten	Provinsi	Penyebab Utama Ketertinggalan Menurut Urutan					
			1	2	3	4	5	6
1	Banggai Kepulauan	Sulawesi Tengah	Sumber Daya Manusia	Kemampuan Keuangan Daerah	Ekonomi	-	-	-
2	Donggala		Karakteristik Daerah	Sumber Daya Manusia	Kemampuan Keuangan Daerah	Aksesibilitas	Sarana dan Prasarana	-
3	Toli-toli		Sumber Daya Manusia	Karakteristik Daerah	Kemampuan Keuangan Daerah	-	-	-
4	Buol		Karakteristik Daerah	Kemampuan Keuangan Daerah	Sumber Daya Manusia	Ekonomi	-	-
5	Parigi Moutong		Aksesibilitas	Sumber Daya Manusia	Karakteristik Daerah	Kemampuan Keuangan Daerah	Sarana dan Prasarana	-
6	Tojo Una-una		Sumber Daya Manusia	Ekonomi	Kemampuan Keuangan Daerah	Karakteristik Daerah	-	-
7	Sigi		Karakteristik Daerah	Ekonomi	Kemampuan Keuangan Daerah	Sumber Daya Manusia	Sarana dan Prasarana	Aksesibilitas
8	Banggai Laut		Sumber Daya Manusia	Kemampuan Keuangan Daerah	Ekonomi	-	-	-
9	Morowali Utara		Kemampuan Keuangan Daerah	Sumber Daya Manusia	Karakteristik Daerah	-	-	-
10	Jenepono	Sulawesi Selatan	Sumber Daya Manusia	Kemampuan Keuangan Daerah	Karakteristik Daerah	-	-	-
11	Konawe	Sulawesi Tenggara	Kemampuan Keuangan Daerah	Ekonomi	-	-	-	-



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 62 -

12	Bombana		Kemampuan Keuangan Daerah	Ekonomi	-	-	-	-
13	Konawe Kepulauan		Kemampuan Keuangan Daerah	Ekonomi	-	-	-	-
14	Boalemo	Gorontalo	Ekonomi	Karakteristik Daerah	Kemampuan Keuangan Daerah	-	-	-
15	Pohuwato		Ekonomi	Kemampuan Keuangan Daerah	Karakteristik Daerah	-	-	-
16	Gorontalo Utara		Kemampuan Keuangan Daerah	Sumber Daya Manusia	Ekonomi	Karakteristik Daerah	-	-
17	Polewali Mandar	Sulawesi Barat	Sumber Daya Manusia	Kemampuan Keuangan Daerah	Sarana dan Prasarana	-	-	-
18	Mamuju Tengah		Kemampuan Keuangan Daerah	Sarana dan Prasarana	-	-	-	-

## 2. Potensi dan Keterkaitan Wilayah

Pengembangan potensi daerah tertinggal di wilayah Sulawesi memperhatikan potensi yang dimiliki pada setiap kabupaten sehingga diharapkan dapat menghasilkan potensi unggulan wilayah. Dalam rangka mengembangkan sektor pertanian yang merupakan sektor basis di seluruh daerah tertinggal di wilayah Sulawesi maka diperlukan pengembangan potensi wilayah dari kriteria hulu dan hilir secara terintegrasi, antara lain melalui pengembangan agroindustri. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah dan diharapkan dapat mengembangkan struktur ekonomi wilayah dari pertanian ke industri dengan berbasis pada agroindustri. Hilirisasi dari pengolahan potensi unggulan berorientasi pada keterkaitan daerah tertinggal dengan daerah pusat pertumbuhan lainnya.

Adapun pengembangan wilayah melalui keterkaitan sektor dalam hal hilirisasi komoditi unggulan dan interaksi spasial dalam hal keterkaitan daerah tertinggal dengan daerah pusat pertumbuhan lainnya di wilayah Sulawesi. Pengembangan sektor unggulan di daerah tertinggal dan kawasan perbatasan yakni Pusat Kawasan Strategis Nasional Tahuna dan Pusat Kawasan Strategis Nasional Melonguane antara lain melalui peningkatan produktivitas di hulu dan percepatan industrialisasi/hilirisasi sektor berbasis pertanian, perkebunan, perikanan, penganekaragaman produk hasil laut, pariwisata bahari, dan budaya.

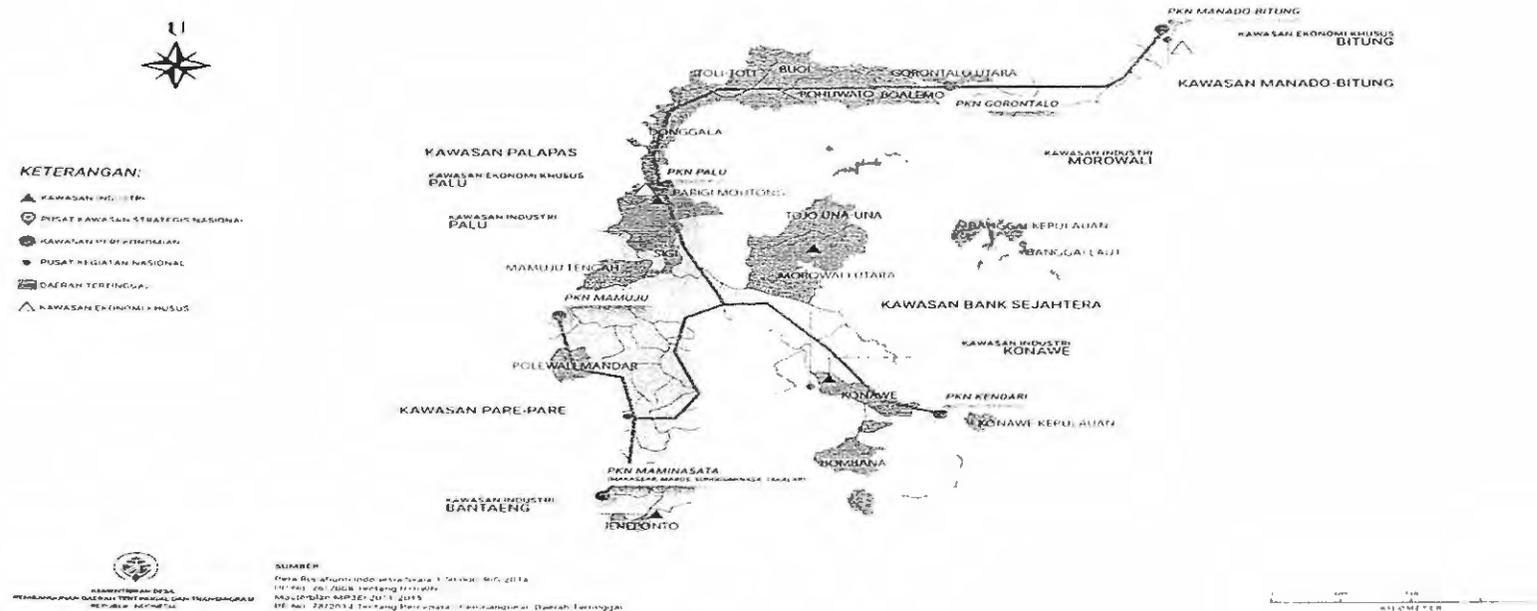


PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 63 -

Gambar 4

Peta Sebaran Daerah Tertinggal dan Pusat Pertumbuhan di Wilayah Sulawesi



Untuk ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 64 -

Untuk menunjang pengembangan sektor unggulan di atas, diperlukan pengembangan ekonomi wilayah secara terintegrasi dari aspek hulu dan hilir (keterkaitan sektor) dengan meningkatkan konektivitas antara daerah pinggiran, seperti daerah tertinggal dan kawasan perbatasan ke pusat pertumbuhan/kawasan strategis yakni dengan Kawasan Palapas, Kawasan Industri Palu, Kawasan Pare-Pare, Kawasan Industri Bantaeng, Kawasan Bank Sejahtera, Kawasan Industri Konawe, Kawasan Industri Morowali, Kawasan Ekonomi Khusus Manado Bitung, Kawasan Manado Bitung dan Kawasan Ekonomi Khusus Palu. Selanjutnya orientasi pengembangan produk unggulan tersebut menuju gerai pemasaran wilayah yakni Pusat Kegiatan Nasional Manado Bitung, Pusat Kegiatan Nasional Gorontalo, Pusat Kegiatan Nasional Palu, Pusat Kegiatan Nasional Kendari, Pusat Kegiatan Nasional Mamuju, dan Pusat Kegiatan Nasional Maminasata.

### 3. Sasaran Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Wilayah Sulawesi

Sasaran pengembangan wilayah Sulawesi sampai dengan tahun 2019 sebagaimana ditunjukkan dalam Tabel 3.8 berikut ini.

Tabel 3.8 ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 65 -

Tabel 3.8  
Sasaran Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Wilayah Sulawesi

Sasaran	Tahun Dasar	Target					KELUARAN JANGKA MENENGAH	Tahun Dasar	Target					KELUARAN JANGKA PENDEK	Tahun Dasar	Target				
	2014	2015*	2016	2017	2018	2019		2014	2015*	2016	2017	2018	2019		2014	2015*	2016	2017	2018	2019
Meningkatnya IPM di Daerah Tertinggal	62,85	63,39	63,92	64,45	64,98	65,51	Kesehatan (Angka Harapan Hidup)	65,58	65,70	65,82	65,93	66,05	66,17	Jumlah Dokter per 1000 Penduduk (Persentase)	0,19**	0,20	0,21	0,24	0,27	0,30
							Harapan Lama Sekolah (tahun)	11,87	12,10	12,33	12,58	12,84	13,10	Angka Partisipasi Sekolah Menengah Pertama (Persentase)	89,71	91,99	91,10	92,26	92,85	93,43
							Standar hidup layak (Pendapatan Nasional Bruto Perkapita) (Ribu rupiah per tahun)	7,64	7,78	7,93	8,09	8,26	8,43	Angka Partisipasi Sekolah Menengah Atas (Persentase)	67,98	68,41	69,81	72,66	74,08	75,50

Meningkatnya ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 66 -

Meningkatnya Laju Petumbuhan Ekonomi di Daerah Tertinggal (Persentase)	6,46	6,80	8,89	9,27	9,65	10,41	Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja (Produk Domestik Regional Bruto/Tenaga Kerja) (Juta/orang/tahun)	49,02	52,32	56,93	60,43	66,17	72,96	Peningkatan persentase desa dengan ketersediaan jalan memadai (jalan aspal) (Persentase)	60,05**	65,31	68,42	72,43	75,61	78,36
Penurunan Persentase Penduduk Miskin (Persentase)	15,75	16,50	15,82	15,14	14,45	13,77	Penurunan Persentase Penduduk Miskin (Garis Kemiskinan) (Rp/kapita/bulan)	3.442.303	4.866.641	5.134.550	5.424.365	5.738.013	6.077.600	Peningkatan persentase rumah tangga pengguna listrik & air bersih (Utilitas) (Persentase)	74,88	76,45	78,01	79,27	80,53	83,05

Ket:

\* Realisasi

\*\* Data Podes 2014

Sumber: BPS (Podes 2014, Susenas 2015) data diolah Dit. PIDT KDPDTT, 2017

4. Arah ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 67 -

4. Arah Kebijakan Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Wilayah Sulawesi

Arah kebijakan percepatan pembangunan daerah tertinggal di wilayah Sulawesi dilakukan melalui promosi potensi daerah tertinggal dan pengembangan kemitraan untuk mempercepat pembangunan dan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan daerah, peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas, pengembangan perekonomian masyarakat yang berbasis pertanian, perkebunan, perikanan, pemenuhan kebutuhan dasar dan kebutuhan pelayanan dasar publik, dan pengembangan infrastruktur penunjang konektivitas antara daerah pinggiran ke pusat pertumbuhan.

5. Strategi Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Wilayah Sulawesi

a. Kriteria Sumber Daya Manusia

Penguatan kemampuan sumber daya manusia dan ilmu pengetahuan dan teknologi difokuskan pada afirmasi pendidikan, peningkatan kapasitas penduduk, dan peningkatan kapasitas aparatur di dalam pelayanan publik dan pengelolaan keuangan. Strategi dalam mendukung kebijakan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan ilmu pengetahuan dan teknologi kabupaten tertinggal di wilayah Sulawesi antara lain:

- 1) pemerataan pelayanan kesehatan, obat, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai (BMHP);
- 2) pengembangan upaya kesehatan berbasis masyarakat;
- 3) penyediaan tenaga kependidikan, pemberian tunjangan khusus bagi tenaga pendidik, fasilitas informasi, dan telekomunikasi serta sarana prasarana penunjang lainnya;
- 4) menggalakkan program wajib belajar pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun;
- 5) penyelenggaraan guru kunjung;

6) pengembangan ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 68 -

- 6) pengembangan pendidikan kesetaraan paket A, paket B, dan paket C;
- 7) menyediakan beasiswa bagi siswa berprestasi yang kurang mampu;
- 8) pembangunan lembaga pendidikan untuk mendukung pengembangan komoditas unggulan berupa sekolah kejuruan jurusan agroindustri, pertanian, pariwisata, peternakan, perikanan, dan pertambangan; dan
- 9) peningkatan kualitas tenaga kerja sesuai dengan potensi lokal guna mendukung pengembangan produk unggulan daerah.

b. Kriteria Kemampuan Keuangan Daerah

Strategi untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah di seluruh daerah tertinggal melalui:

- 1) penguatan kapasitas dan kelembagaan daerah dalam rangka penerapan prinsip pemerintahan yang baik;
- 2) penguatan kapasitas pemerintah daerah dalam meningkatkan iklim investasi yang kondusif;
- 3) meningkatkan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) baru dan potensi penerimaan daerah yang bersumber dari penerimaan lain yang sah; dan
- 4) memperbaiki sistem penerimaan pajak dan retribusi.

c. Kriteria Perekonomian Masyarakat

Strategi untuk mendukung pengembangan perekonomian kabupaten tertinggal di wilayah Sulawesi berbasis komoditas unggulan lokal di bidang pertanian, perkebunan, perikanan, dan kemaritiman serta keanekaragaman hayati antara lain sebagai berikut:

- 1) meningkatkan promosi potensi unggulan Sulawesi dengan meningkatkan pengolahan bahan mentah menjadi bahan setengah jadi dan bahan jadi sehingga menghasilkan nilai tambah bagi masyarakat lokal, pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus/Kawasan Industri Palu yang berbasis agroindustri kakao, karet, rumput laut, dan rotan khususnya di Kabupaten Donggala, Parigi Moutong dan Sigi, Kawasan Industri Morowali, dan Kawasan Industri Konawe;

2) peningkatan ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 69 -

- 2) peningkatan kualitas dan produktivitas komoditas unggulan di sektor hulu;
  - a) mengembangkan produk pertanian dan perikanan berbasis teknologi untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing industri pengolahan dan jasa;
  - b) mengembangkan daya tarik pariwisata bahari di Kabupaten Tojo Una-Una dan Kabupaten Banggai Kepulauan melalui penataan kawasan pariwisata dan amenitas pariwisata;
  - c) mengembangkan kawasan pertanian terpadu, berbasis komoditas padi dan jagung, cengkeh, dan kopra; dan
  - d) mengembangkan kawasan budidaya perikanan melalui bantuan prasarana dan sarana di Kabupaten Boalemo, Bombana, Gorontalo Utara, Konawe, Pohuwato, dan Polewali Mandar.
- 3) strategi pengentasan kemiskinan di seluruh kabupaten tertinggal di wilayah Sulawesi melalui:
  - a) peningkatan investasi daerah untuk meningkatkan penciptaan lapangan kerja di kabupaten tertinggal;
  - b) pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) untuk mendukung ekonomi desa, memfasilitasi masyarakat dalam mengelola dan memanfaatkannya; dan
  - c) peningkatan akses masyarakat desa terhadap modal usaha dan pemasaran.
- d. Kriteria Karakteristik Daerah  
Strategi untuk menciptakan pembangunan kabupaten tertinggal yang juga memperhatikan kriteria karakteristik daerah dan mendukung kebijakan pengembangan wilayah berbasis kepulauan. Untuk menciptakan pembangunan daerah tertinggal yang juga memperhatikan kriteria karakteristik daerah terutama di Kabupaten Boalemo, Sigi, Donggala, Buol, Parigi Moutong, Toli-Toli, Tojo Una-Una, Morowali Utara, Jeneponto, Gorontalo Utara, dan Pohuwato dilakukan strategi meliputi:

1) pengembangan ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 88 -

3. Sasaran Pengembangan Wilayah Jawa

Sasaran pengembangan wilayah Jawa sampai dengan tahun 2019 sebagaimana ditunjukkan dalam Tabel 3.12 berikut ini.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 89 -

Tabel 3.12  
Sasaran Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Wilayah Jawa

Sasaran	Tahun Dasar	Target					KELUARAN JANGKA MENENGAH	Tahun Dasar	Target					KELUARAN JANGKA PENDEK	Tahun Dasar	Target				
	2014	2015*	2016	2017	2018	2019		2014	2015*	2016	2017	2018	2019		2014	2015*	2016	2017	2018	2019
Meningkatnya IPM di Daerah Tertinggal	61,46	62,15	62,75	63,39	64,01	64,64	Kesehatan (Angka Harapan Hidup)	66,57	66,85	67,14	67,42	67,71	68,00	Jumlah Dokter per 1000 Penduduk (Persentase)	0,09**	0,09	0,09	0,09	0,10	0,10
							Harapan Lama Sekolah (tahun)	12,11	12,30	12,49	12,70	12,92	13,15	Angka Partisipasi Sekolah Menengah Pertama (Persentase)	90,98	92,41	94,09	95,36	96,00	96,63
							Standar hidup layak (Pendapatan Nasional Bruto Perkapita) (Ribu rupiah per tahun)	8,06	8,26	8,39	8,54	8,69	8,85	Angka Partisipasi Sekolah Menengah Atas (Persentase)	62,35	59,41	55,05	57,24	58,33	59,43

Meningkatnya ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 90 -

Meningkatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi di Daerah Tertinggal (Persentase)	5,03	3,27	4,33	4,43	4,52	4,72	Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja (Produk Domestik Regional Bruto/Tenaga Kerja) (Juta/orang/tahun)	31,22	32,25	33,65	34,80	36,37	38,07	Peningkatan persentase desa dengan ketersediaan jalan memadai (jalan aspal) (Persentase)	70,32**	72,53	73,15	73,77	74,38	75,07
Penurunan Persentase Penduduk Miskin (Persentase)	15,79	16,21	15,50	14,80	14,09	13,38	Penurunan Persentase Penduduk Miskin (Garis Kemiskinan) (Rp/kapita/bulan)	1.580.664	1.647.657	1.764.885	1.890.670	2.025.651	2.170.518	Peningkatan persentase rumah tangga pengguna listrik & air bersih (Utilitas) (Persentase)	77,44	78,34	79,23	79,94	80,64	82,04

Ket:

\* Realisasi

\*\* Data Podes 2014

Sumber: BPS (Podes 2014, Susenas 2015) data diolah Dit. PIDT KDPDTT, 2017

4. Arah ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 91 -

4. Arah Kebijakan Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal wilayah Jawa

Arah kebijakan percepatan pembangunan daerah tertinggal di wilayah Jawa difokuskan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, promosi potensi daerah tertinggal, dan pengembangan kemitraan untuk mempercepat pembangunan dan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan, pemenuhan kebutuhan dasar dan kebutuhan pelayanan dasar publik, mendukung pengembangan perekonomian masyarakat yang berbasis industri dan jasa, dan pembangunan infrastruktur penunjang konektivitas antara daerah tertinggal terhadap perkotaan dan pusat pertumbuhan.

5. Strategi Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal di Wilayah Jawa

a. Kriteria Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

Penguatan kemampuan sumber daya manusia dan ilmu pengetahuan dan teknologi difokuskan pada afirmasi pendidikan, peningkatan kapasitas penduduk, dan peningkatan kapasitas aparatur di dalam pelayanan publik dan pengelolaan keuangan. Strategi dalam mendukung kebijakan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan ilmu pengetahuan dan teknologi kabupaten tertinggal di wilayah Jawa antara lain:

- 1) pemerataan distribusi tenaga pendidik di seluruh kabupaten daerah tertinggal;
- 2) pengembangan program pendidikan wajib belajar 12 (dua belas) tahun di seluruh daerah tertinggal melalui pendekatan sosial budaya dan keagamaan;
- 3) penyetaraan program pendidikan pondok pesantren;
- 4) pengembangan kewirausahaan melalui pengembangan aktivitas ekonomi, sekolah kejuruan, dan pelatihan teknis;
- 5) pengembangan kapasitas para pelaku usaha khususnya subsektor perkebunan dan perikanan laut;
- 6) pengembangan pendidikan kesetaraan paket A, paket B, dan paket C;

7) pemerataan ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 92 -

- 7) pemerataan pelayanan kesehatan, obat, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai (BMHP);
- 8) pengembangan upaya pendidikan dan kesehatan berbasis masyarakat; dan
- 9) pengadaan pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas) keliling.

b. Kriteria Kemampuan Keuangan Daerah

Peningkatan kemampuan keuangan daerah di seluruh daerah tertinggal melalui:

- 1) penguatan kapasitas dan kelembagaan daerah dalam rangka penerapan prinsip pemerintahan yang baik;
- 2) penguatan kapasitas pemerintah daerah dalam meningkatkan iklim investasi yang kondusif;
- 3) meningkatkan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) baru dan potensi penerimaan daerah yang bersumber dari penerimaan lain yang sah; dan
- 4) memperbaiki sistem penerimaan pajak dan retribusi.

c. Kriteria Sarana Prasarana dan Aksesibilitas

Strategi peningkatan sarana prasarana dan aksesibilitas di wilayah Jawa dilakukan melalui:

- 1) pembangunan infrastruktur jalan dan sarana transportasi desa;
- 2) pembangunan pasar terutama di Kabupaten Pandeglang, Lebak, Bangkalan, dan Bondowoso;
- 3) pengembangan fasilitas rumah sakit umum daerah pratama terutama di Kabupaten Situbondo, Sampang, Lebak, dan Pandeglang;
- 4) pemerataan distribusi tenaga kesehatan dan peningkatan kapasitas tenaga kesehatan terutama di Kabupaten Bondowoso, Situbondo, Bangkalan, Sampang, Pandeglang, dan Lebak;

5) pembangunan ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 93 -

- 5) pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana pendidikan untuk mendukung wajib belajar 12 (dua belas) tahun terutama di Kabupaten Situbondo, Lebak, dan Pandeglang, serta pembangunan gedung Politeknik Negeri Madura (Situbondo);
- 6) pembangunan menara penguat sinyal, pengembangan jaringan internet, dan pengembangan pusat internet perdesaan terutama di Kabupaten Situbondo;
- 7) peningkatan pelayanan prasarana permukiman, seperti pelayanan air minum, pengelolaan air limbah, dan pengelolaan sampah dan drainase terutama di Kabupaten Pandeglang, Situbondo, dan Lebak;
- 8) pengembangan fasilitas pelabuhan di Pandeglang, Bangkalan, dan Situbondo; dan
- 9) pengembangan kajian pembangunan bandar udara Banten Selatan di Pandeglang.

d. Kriteria Karakteristik Daerah

Strategi untuk menciptakan pembangunan kabupaten tertinggal yang juga memperhatikan kriteria karakteristik daerah di Kabupaten Situbondo, Pandeglang, dan Lebak, melalui:

- 1) pengelolaan hutan kemasyarakatan sesuai dengan potensi kearifan lokal;
- 2) pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana mitigasi bencana;
- 3) pelaksanaan dan monitoring rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana; dan
- 4) pemberdayaan komunitas adat atau masyarakat adat untuk mewujudkan keamanan, pencegahan, dan penyelesaian konflik.

e. Kriteria ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 94 -

e. Kriteria Perekonomian Masyarakat

Strategi untuk mendukung pengembangan perekonomian kabupaten tertinggal di wilayah Jawa berbasis komoditas unggulan lokal di bidang pertanian, perkebunan, perikanan, pariwisata, dan kemaritiman serta keanekaragaman hayati antara lain sebagai berikut:

- 1) pengembangan promosi dan komoditas unggulan di Pulau Jawa antara lain:
  - a) Kabupaten Bondowoso, melalui:
    - (1) pengembangan sapi indukan wajib bunting (SIWAB), bantuan benih ikan dan kopi arabica;
    - (2) penataan kawasan pariwisata dan amentias pariwisata; dan
    - (3) pembangunan embung untuk irigasi pertanian;
  - b) Kabupaten Situbondo melalui pengembangan budidaya ikan kerapu, budidaya udang fanami, bantuan sapi indukan wajib bunting (SIWAB), dan bantuan alat pengemasan kopi luwak;
  - c) Kabupaten Sampang melalui penataan kawasan pariwisata dan amenitas pariwisata di Bendungan Klampis, Bendungan dan Hutan Kera Nepa;
  - d) Kabupaten Pandeglang melalui bantuan sapi indukan wajib bunting (SIWAB), pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung; dan
  - e) Kabupaten Lebak melalui peningkatan intensifikasi padi, palawija, pembibitan, bantuan sapi indukan wajib bunting (SIWAB) pembangunan pasar dan rehabilitasi jaringan irigasi.
- 2) pelatihan tenaga kerja sektor unggulan;
- 3) peningkatan kapasitas petani dan nelayan dalam pemanfaatan sumber daya; dan
- 4) pengembangan koperasi dan usaha kecil menengah (KUKM), Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) dan lembaga ekonomi lainnya dalam meningkatkan akses permodalan dan pemasaran bagi masyarakat desa.

G. Percepatan ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 95 -

G. Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal di Wilayah Sumatera

1. Penyebab Utama Ketertinggalan di Wilayah Sumatera

Berdasarkan analisis indeks ketertinggalan pada 154 (seratus lima puluh empat) kabupaten/kota di wilayah Sumatera terdapat 13 (tiga belas) kabupaten sebesar 8,44% (delapan koma empat puluh empat persen) yang dikategorikan tertinggal dan 141 (seratus empat puluh satu) kabupaten/kota sebesar 91,56% (sembilan puluh satu koma lima puluh enam persen) tidak tertinggal. Daftar kabupaten tertinggal dan penyebab utama ketertinggalan di wilayah Sumatera akan ditunjukkan dalam Tabel 3.13 berikut ini.

Tabel 3.13  
Daftar Kabupaten Tertinggal dan Penyebab Utama Ketertinggalan di Wilayah Sumatera Tahun 2015-2019

No	Kabupaten	Provinsi	Penyebab Utama Ketertinggalan Menurut Urutan					
			1	2	3	4	5	6
1	Aceh Singkil	Aceh	Sumber Daya Manusia	Ekonomi	Kemampuan Keuangan Daerah	Karakteristik Daerah	-	-
2	Nias	Sumatera Utara	Sarana dan Prasarana	Kemampuan Keuangan Daerah	Ekonomi	-	-	-
3	Nias Selatan		Aksesibilitas	Sarana dan Prasarana	Ekonomi	Kemampuan Keuangan Daerah	-	-
4	Nias Utara		Ekonomi	Sarana dan Prasarana	Kemampuan Keuangan Daerah	Karakteristik Daerah	-	-
5	Nias Barat		Ekonomi	Sarana dan Prasarana	Kemampuan Keuangan Daerah	Sumber Daya Manusia	Karakteristik Daerah	-
6	Solok Selatan		Sumatera Barat	Karakteristik Daerah	Sumber Daya Manusia	Kemampuan Keuangan Daerah	-	-
7	Kep. Mentawai	Aksesibilitas		Sarana dan Prasarana	Ekonomi	Karakteristik Daerah	Kemampuan Keuangan Daerah	-
8	Pasaman Barat	Karakteristik Daerah		Sarana dan Prasarana	Sumber Daya Manusia	Kemampuan Keuangan Daerah	-	-
9	Musi Rawas	Sumatera Selatan	Sumber Daya Manusia	Ekonomi	Sarana dan Prasarana	-	-	-
10	Musi Rawas Utara		Sumber Daya Manusia	Ekonomi	Sarana dan Prasarana	-	-	-
11	Seluma	Bengkulu	Ekonomi	Kemampuan Keuangan Daerah	Sumber Daya Manusia	-	-	-
12	Lampung Barat	Lampung	Kemampuan Keuangan Daerah	Ekonomi	Sarana dan Prasarana	-	-	-
13	Pesisir Barat		Kemampuan Keuangan Daerah	Ekonomi	Sarana dan Prasarana	-	-	-



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 96 -

## 2. Potensi dan Keterkaitan Wilayah

Pengembangan potensi daerah tertinggal di wilayah Sumatera harus memperhatikan sektor unggulan wilayah. Dalam rangka mengembangkan sektor pertanian yang merupakan sektor basis di seluruh daerah tertinggal di wilayah Sumatera maka diperlukan pengembangan potensi wilayah dari aspek hulu dan hilir secara terintegrasi, antara lain melalui pengembangan agroindustri dan pengembangan kawasan pertanian dan perkebunan.

Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah dan diharapkan dapat mentransformasikan struktur ekonomi wilayah dari pertanian ke industri dengan berbasis pada agroindustri. Hilirisasi dari pengolahan potensi unggulan berorientasi pada keterkaitan daerah tertinggal dengan daerah pusat pertumbuhan lainnya.

Untuk menunjang pengembangan sektor unggulan di wilayah Sumatera, diperlukan pengembangan ekonomi wilayah secara terintegrasi dari aspek hulu dan hilir (keterkaitan sektor) dengan meningkatkan konektivitas antara daerah pinggiran, seperti daerah tertinggal dan kawasan perbatasan ke pusat pertumbuhan/kawasan strategis yakni dengan Kawasan Ekonomi Sei Mangkei dan Kawasan Ekonomi Tanjung Api-Api sebagai sentra pengolahan komoditas unggulan kelapa sawit dan karet menjadi produk bernilai tambah tinggi, serta pusat logistik, Kawasan Banda Aceh Darussalam, Kawasan Industri Kuala Tanjung, dan Kawasan Industri Tanggamus.

Gambar 7 ...





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 98 -

Selanjutnya orientasi pengembangan produk unggulan tersebut menuju gerai pemasaran wilayah, yakni pusat kegiatan nasional berfungsi sebagai gerai pemasaran untuk wilayah Sumatera, meliputi Pusat Kegiatan Nasional Lhoksemauwe, Pusat Kegiatan Nasional Mebidangro (Kota Medan, Binjai, Kabupaten Deli Serdang, dan Kabupaten Karo), Pusat Kegiatan Nasional Padang, Pusat Kegiatan Nasional Palembang, dan Pusat Kegiatan Nasional Bandar Lampung. Kawasan berorientasi ekspor di kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Batam, Bintan dan Karimun, dan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang.

3. Sasaran Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal di Wilayah Sumatera

Sasaran pengembangan wilayah Sumatera sampai dengan tahun 2019 sebagaimana ditunjukkan dalam Tabel 3.14 berikut ini.

Tabel 3.14 ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 99 -

Tabel 3.14  
Sasaran Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal di Wilayah Sumatera

Sasaran	Tahun Dasar	Target					KELUARAN JANGKA MENENGAH	Tahun Dasar	Target					KELUARAN JANGKA PENDEK	Tahun Dasar	Target				
	2014	2015*	2016	2017	2018	2019		2014	2015*	2016	2017	2018	2019		2014	2015*	2016	2017	2018	2019
Meningkatnya IPM di Daerah Tertinggal	61,24	62,04	62,78	63,61	64,39	65,20	Kesehatan (Angka Harapan Hidup)	66,26	66,54	66,83	67,12	67,42	67,71	Jumlah Dokter per 1000 Penduduk (Persentase)	0,16**	0,16	0,17	0,19	0,22	0,24
							Harapan Lama Sekolah (tahun)	11,81	12,12	12,44	12,78	13,13	13,49	Angka Partisipasi Sekolah Menengah Pertama (Persentase)	93,69	93,66	94,09	95,32	95,94	96,54
							Standar hidup layak (Pendapatan Nasional Bruto Perkapita) (Ribu rupiah per tahun)	7,18	7,36	7,55	7,75	7,96	8,18	Angka Partisipasi Sekolah Menengah Atas (Persentase)	73,47	71,20	75,64	78,23	79,52	80,82

Meningkatnya ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 100 -

Meningkatnya Laju Petumbuhan Ekonomi di Daerah Tertinggal (Persentase)	6.30	4.98	6.04	6.23	6.42	6.80	Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja (Produk Domestik Regional Bruto/Tenaga Kerja) (Juta/orang/tahun)	37,93	39.82	-42,23	43,75	46,50	49,60	Peningkatan persentase desa dengan ketersediaan jalan memadai (jalan aspal) (Persentase)	48,51**	49,89	52,89	55,84	58,50	61,22
Penurunan Persentase Penduduk Miskin (Persentase)	17,13	18,48	17,68	16,89	16,10	15,30	Penurunan Persentase Penduduk Miskin (Garis Kemiskinan) (Rp/kapita/bulan)	3.211.279	+ 034.131	+ 237.961	4.453.844	4.682.529	4.924.815	Peningkatan persentase rumah tangga pengguna listrik & air bersih (Utilitas) (Persentase)	64,84	66,65	68,45	70,05	71,64	74,84

Ket:

\* Realisasi

\*\* Data Podes 2014

Sumber: BPS (Podes 2014, Susenas 2015) data diolah Dit. PIDT KDPDPT, 2017

4. Arah ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 101 -

4. Arah Kebijakan Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Wilayah Sumatera

Arah kebijakan percepatan pembangunan daerah tertinggal di wilayah Sumatera meliputi pengembangan perekonomian masyarakat, pemenuhan kebutuhan dasar dan kebutuhan pelayanan dasar publik, peningkatan kualitas sumber daya manusia, promosi potensi daerah tertinggal, dan pengembangan kemitraan untuk mempercepat pembangunan dan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan, dan pembangunan infrastruktur penunjang konektivitas antara daerah tertinggal terhadap perkotaan dan pusat pertumbuhan.

5. Strategi Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Wilayah Sumatera

a. Kriteria Perekonomian Masyarakat

Perekonomian wilayah Sumatera ditopang oleh beberapa sektor utama yaitu pertanian terutama perkebunan dan industri pengolahan berbasis komoditas kelapa sawit dan karet serta industri perikanan dan pariwisata bahari. Sumatera merupakan salah satu pintu gerbang Indonesia dalam perdagangan internasional. Adapun strategi peningkatan perekonomian masyarakat di daerah tertinggal melalui peningkatan promosi dan pengembangan komoditi unggulan daerah tertinggal di wilayah Sumatera, meliputi bidang pertanian, perkebunan, perikanan, dan pariwisata antara lain:

- 1) promosi terhadap potensi unggulan dan peningkatan kewirausahaan masyarakat di semua daerah tertinggal;
- 2) penataan dan peningkatan amenitas pariwisata terutama di Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Siberut (Kepulauan Mentawai), Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Teluk Dalam Nias (Nias, Nias Barat, Nias Selatan, Nias Utara);
- 3) penyediaan bibit perikanan, bantuan pengolah pertanian, dan promosi kopi;
- 4) peningkatan kapasitas dan kualitas produk di sektor pertanian, perikanan dan peternakan;

5) pengadaan ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 102 -

- 5) pengadaan sapi indukan wajib bunting (SIWAB), benih unggul jagung, benih ikan, kapal penangkap ikan dan perlengkapannya;
- 6) pengembangan koperasi dan usaha kecil menengah (KUKM), Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) dan lembaga ekonomi lainnya untuk meningkatkan akses permodalan dan pemasaran bagi masyarakat desa;
- 7) peningkatan kapasitas petani dan nelayan dalam pemanfaatan sumber daya; dan
- 8) pembangunan pasar terutama di Kabupaten Nias Selatan, Musi Rawas, dan Musi Rawas Utara.

b. Kriteria Sarana dan Prasarana

Pemenuhan standar pelayanan minimal di daerah tertinggal wilayah Sumatera dengan pengembangan sarana dan prasarana sebagai berikut:

- 1) pembangunan infrastruktur jalan di seluruh daerah tertinggal;
- 2) meningkatkan konektivitas dengan membangun sistem jaringan jalan lokal/nonstatus yang saling terhubung dengan pusat kegiatan ekonomi, dan jaringan logistik darat antara lokasi perkebunan, pengolahan, dan akses ke pelabuhan;
- 3) pembangunan sarana dan prasarana pendidikan meliputi:
  - a) penyelenggaraan sekolah satu atap (sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas/sekolah menengah kejuruan); dan
  - b) pembangunan sekolah, asrama sekolah, sekolah berasrama atau ruang kelas baru.
- 4) pembangunan sarana dan prasarana kesehatan, meliputi:

a) pemenuhan ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 103 -

- a) pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan, obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai (BMHP);
  - b) pengadaan sarana kesehatan keliling sesuai karakteristik daerah; dan;
  - c) pengembangan fasilitas rumah sakit pratama terutama yang termasuk Daerah Tertinggal, Perbatasan, dan Kepulauan terluar (DTPK).
- 5) pengembangan pasar sebagai sarana pengembangan sarana distribusi perdagangan terutama di Kabupaten Musi Rawas Utara, Nias Barat, Solok Selatan, dan Musi Rawas;
- 6) percepatan pemenuhan kebutuhan elektrifikasi terutama di seluruh wilayah yang belum terlistriki, terutama Kabupaten Kepulauan Mentawai, Nias Selatan dan Nias Barat;
- 7) pembangunan sarana dan prasarana informasi dan telekomunikasi meliputi:
- a) penyediaan stasiun pemancar atau *Base Transceiver Station* (BTS) di wilayah nir sinyal (*blankspot*) layanan telekomunikasi;
  - b) penyediaan akses pita lebar (*broadband*) internet; dan
  - c) penyediaan infrastruktur penyiaran publik dan peningkatan jangkauan siaran melalui revitalisasi infrastruktur penyiaran publik;
  - d) penempatan tenaga penyuluh informasi publik di kecamatan daerah terdepan, tertinggal, dan terluar.
- 8) pembangunan sarana dan prasarana permukiman, meliputi:
- a) pembangunan perumahan layak huni;
  - b) pembangunan sarana air bersih; dan

c. perbaikan ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 104 -

c) perbaikan lingkungan permukiman tidak layak huni.

c. Kriteria Sumber Daya Manusia

Strategi dalam mendukung kebijakan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan ilmu pengetahuan dan teknologi kabupaten tertinggal di wilayah Sumatera antara lain:

- 1) pemerataan pelayanan kesehatan, obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai (BMHP);
- 2) pemerataan distribusi dan pemberian insentif bagi tenaga pendidik;
- 3) pengembangan pendidikan kesetaraan paket A, paket B, dan paket C;
- 4) pemberian kuota khusus beasiswa (beasiswa afirmasi) perguruan tinggi untuk daerah tertinggal;
- 5) pengembangan sekolah kejuruan dalam menunjang pengelolaan hasil bumi, terutama di Kabupaten Nias Barat dan Nias Selatan; dan
- 6) pengembangan balai pelatihan kerja dan kewirausahaan serta pengembangan pusat informasi dan teknologi untuk menunjang pengembangan usaha, khususnya pada sektor perkebunan dan perikanan laut.

d. Kriteria Kemampuan Keuangan Daerah

Dalam upaya mendukung percepatan pembangunan daerah tertinggal, bentuk afirmasi dilakukan dengan evaluasi terhadap harmonisasi regulasi untuk menciptakan iklim yang kondusif dalam pengelolaan hasil bumi dan energi, melalui:

- 1) harmonisasi kebijakan, program, dan kegiatan daerah untuk percepatan pembangunan daerah tertinggal;
- 2) peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan daerah dalam pengelolaan keuangan dan ekonomi daerah;
- 3) penguatan kapasitas pemerintah daerah dalam meningkatkan iklim investasi yang kondusif;

4) meningkatkan ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 105 -

- 4) meningkatkan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) baru dan potensi penerimaan daerah yang bersumber dari penerimaan lain yang sah; dan
  - 5) memperbaiki sistem penerimaan pajak dan retribusi.
- e. Kriteria Karakteristik Daerah
- Potensi ancaman bencana yang dominan terjadi di wilayah Sumatera adalah tsunami, banjir, gempa bumi, tanah longsor, kebakaran hutan dan lahan kritis, dan desa konflik, sehingga perlu penanganan karakteristik daerah melalui:
- 1) pengembangan sistem pengawasan dan pemanfaatan sumber daya alam oleh masyarakat;
  - 2) pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana mitigasi bencana;
  - 3) pelaksanaan dan monitoring rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana;
  - 4) pengelolaan hutan kemasyarakatan sesuai dengan potensi kearifan lokal, dan konservasi sumber daya kawasan berlahan kritis; dan
  - 5) peningkatan kapasitas masyarakat dalam manajemen konflik, rekonsiliasi, dan rekonstruksi dengan melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh adat.
- f. Kriteria Aksesibilitas
- Peningkatan konektivitas daerah tertinggal dengan pusat pertumbuhan yang diprioritaskan pada ketersediaan aksesibilitas penunjang peningkatan kinerja pembangunan ekonomi melalui:
- 1) peningkatan konektivitas daerah tertinggal dengan pusat pertumbuhan untuk mendukung pembangunan ekonomi;
  - 2) pengembangan pelabuhan di pulau kecil terutama di Kepulauan Mentawai, Nias, Nias Selatan, dan Nias Utara;
  - 3) peningkatan penyediaan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan;
  - 4) pengembangan bandar udara di Kabupaten Nias, Pesisir Barat, Kepulauan Mentawai, dan Bandar Udara Perintis Hamzah Fansuri di Aceh Singkil.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 70 -

- 1) pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana mitigasi bencana;
- 2) pelestarian kawasan lindung melalui:
  - a) pemantapan dan rehabilitasi kawasan lindung yang terdegradasi;
  - b) pengelolaan hutan kemasyarakatan sesuai dengan potensi kearifan lokal;
  - c) peningkatan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan berbasis daerah aliran sungai; dan
  - d) rehabilitasi hutan, lahan, dan daerah aliran sungai dengan mempertimbangkan morfologi tanah, curah hujan, kondisi geologi, dan jenis tanamannya.
- e. Kriteria Sarana dan Prasarana  
Pengembangan sarana dan prasarana yang mendukung pemenuhan standar pelayanan minimal meliputi:
  - 1) pengembangan sarana dan prasarana jalan yang terpadu dengan jaringan transportasi penyeberangan, pelabuhan, dan bandar udara yang menghubungkan daerah berpotensi dengan pusat kawasan atau pertumbuhan terdekat di Kabupaten Konawe Kepulauan, Banggai Laut, Boalemo, Sigi, Mamuju Tengah, Bombana, Morowali Utara, Tojo Una-una, Buol, Toli-toli, Pohuwato, Gorontalo Utara, Jeneponto, Donggala, Banggai Kepulauan, Polewali Mandar, dan Konawe;
  - 2) percepatan pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan melalui:
    - a) pembangunan sarana dan prasarana serta pelayanan pendidikan yang sesuai dengan karakteristik daerah di seluruh kabupaten;
    - b) pembangunan sekolah, asrama sekolah, sekolah berasrama atau ruang kelas baru; dan
    - c) penyelenggaraan pelatihan keterampilan dan keahlian profesional di wilayah terisolir dan wilayah perbatasan.
  - 3) pengembangan ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 71 -

- 3) pengembangan sarana prasarana kesehatan terutama di Kabupaten Jeneponto, Polewali Mandar, Toli-toli, Mamuju Tengah, Donggala, Parigi Moutong, Boalemo, Pohuwato, Sigi, dan Buol melalui:
  - a) pembangunan sarana dan prasarana kesehatan yang sesuai dengan karakteristik daerah tertinggal;
  - b) pengembangan fasilitas rumah sakit pratama terutama yang termasuk Daerah Tertinggal, Perbatasan, dan Kepulauan terluar (DTPK); dan
  - c) pengadaan dan pemerataan tenaga kesehatan, peningkatan kapasitas, dan pemberian tunjangan khusus bagi tenaga kesehatan di seluruh daerah tertinggal terutama di Kabupaten Jeneponto, Donggala, Konawe Kepulauan, Sigi, Toli-toli, Buol, Banggai Kepulauan, Polewali Mandar, Gorontalo Utara, dan Tojo Una-una.
- 4) pembangunan pasar terutama di Kabupaten Konawe dan Parigi Moutong;
- 5) percepatan pemenuhan kebutuhan elektrifikasi terutama di seluruh wilayah yang belum terlistriki;
- 6) percepatan pemenuhan sarana dan prasarana informasi dan telekomunikasi melalui:
  - a) penyediaan infrastruktur penyiaran publik dan peningkatan jangkauan siaran melalui revitalisasi infrastruktur penyiaran publik;
  - b) penyediaan stasiun pemancar atau *Base Transceiver Station* (BTS) di wilayah nirsinyal (*blankspot*) layanan telekomunikasi; dan
  - c) penyediaan akses pita lebar (*broadband*) internet.
- 7) pembangunan sarana dan prasaran air bersih melalui:
  - a) peningkatkan kualitas jaringan dan keterpaduan sistem jaringan untuk pemenuhan kebutuhan rumah tangga; dan
  - b) penyediaan sumber daya air untuk mendukung usaha pertanian pangan dan perkebunan.

f. Pembangunan ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 72 -

f. Pembangunan Kriteria Aksesibilitas

Strategi untuk mendukung konektivitas daerah tertinggal di wilayah Sulawesi sebagai berikut:

- 1) pembangunan bandar udara di Kabupaten Pohuwato dan pengembangan Bandar Udara Ampana di Kabupaten Tojo Una-una;
- 2) pengembangan pelabuhan penyeberangan di Tolinggula (Gorontalo Utara) dan Marisa (Pohuwato), pengembangan fasilitas pelabuhan di Pelabuhan Laut Tanjung Silopo (Polewali Mandar), Toli-Toli, Parigi Moutong (Parigi Moutong), Kolonedale (Morowali Utara), Ogoamas (Donggala), Leok (Buol), dan Jenepono (Jenepono); dan
- 3) pengembangan dermaga angkutan sungai, danau, dan penyebrangan Dongkala Kabupaten Bombana dan Kolonedale Kabupaten Morowali Utara.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 73 -

E. Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal di Wilayah Kalimantan

1. Penyebab Utama Ketertinggalan di Wilayah Kalimantan

Berdasarkan analisis indeks ketertinggalan pada 56 (lima puluh enam) kabupaten/kota di wilayah Kalimantan, terdapat 12 (dua belas) kabupaten sebesar 21,43% (dua puluh satu koma empat puluh tiga persen) yang dikategorikan tertinggal dan 44 (empat puluh empat) kabupaten/kota sebesar 78,57% (tujuh puluh delapan koma lima puluh tujuh persen) tidak tertinggal. Daftar kabupaten tertinggal dan penyebab utama ketertinggalan di wilayah Kalimantan akan ditunjukkan dalam Tabel 3.9 berikut ini.

Tabel 3.9

Daftar Kabupaten Tertinggal dan Penyebab Utama Ketertinggalan  
Wilayah Kalimantan Tahun 2015-2019

No	Kabupaten	Provinsi	Penyebab Utama Ketertinggalan Menurut Urutan					
			1	2	3	4	5	6
1.	Sambas	Kalimantan Barat	Sumber Daya Manusia	Kemampuan Keuangan Daerah	Karakteristik Daerah	-	-	
2.	Bengkayang		Kemampuan Keuangan Daerah	Sarana dan Prasarana	-	-	-	
3.	Landak		Sarana dan Prasarana	Sumber Daya Manusia	Aksesibilitas	Kemampuan Keuangan Daerah	Ekonomi	
4.	Ketapang		Aksesibilitas	Sarana dan Prasarana	Karakteristik Daerah	Sumber Daya Manusia	-	
5.	Sintang		Aksesibilitas	Sarana dan Prasarana	-	-	-	
6.	Kapuas Hulu		Aksesibilitas	Sumber Daya Manusia	Sarana dan Prasarana	Karakteristik Daerah	-	
7.	Melawi		Sarana dan Prasarana	Kemampuan Keuangan Daerah	Karakteristik Daerah	Ekonomi	Aksesibilitas	
8.	Kayong Utara		Sumber Daya Manusia	Kemampuan Keuangan Daerah	-	-	-	
9.	Seruyan	Kalimantan Tengah	Aksesibilitas	Sarana dan Prasarana	-	-	-	
10.	Hulu Sungai Utara	Kalimantan Selatan	Sumber Daya	Karakteristik Daerah	Kemampuan Keuangan	-	-	



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 74 -

			Manusia		Daerah			
11.	Mahakam Ulu	Kalimantan Timur	Aksesibilitas	Karakteristik Daerah	-	-	-	
12.	Nunukan	Kalimantan Utara	Aksesibilitas	Sarana dan Prasarana	Karakteristik Daerah	-	-	

## 2. Potensi dan Keterkaitan Wilayah

Pengembangan potensi ekonomi lokal daerah tertinggal di wilayah Kalimantan memperhatikan pendekatan keterkaitan antarwilayah terhadap pusat pertumbuhan wilayah. Dalam hal ini, pusat pertumbuhan berfungsi sebagai lokomotif dalam pengembangan potensi ekonomi pada daerah tertinggal yang merupakan daerah penyangga pertumbuhan pusat kegiatan yang sudah ada.

Pengembangan sektor unggulan dari daerah tertinggal di wilayah Kalimantan berhubungan dengan kawasan perbatasan dan kawasan strategis yaitu Pusat Kawasan Strategis Nasional Aruk (Sambas), Pusat Kawasan Strategis Nasional Jagoibabang (Bengkayang), Pusat Kawasan Strategis Nasional Jasa (Sintang), Pusat Kawasan Strategis Nasional Nangabadau (Kapuas Hulu), Pusat Kawasan Strategis Nasional Simanggaris dan Pusat Kawasan Strategis Nasional Nunukan (Nunukan), dan Pusat Kawasan Strategis Nasional Longpahangai (Mahakam Ulu). Untuk itu perlu ditingkatkan produktivitas di hulu dan percepatan industrialisasi/hilirisasi antara lain sektor pertanian dan perkebunan, penganekaragaman pengolahan hasil hutan, perikanan darat-sungai, perkebunan, jasa, tanaman pangan, peternakan, pariwisata bahari, dan budaya.





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 76 -

3. Sasaran Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Wilayah Kalimantan

Sasaran pengembangan wilayah Kalimantan sampai dengan tahun 2019 sebagaimana ditunjukkan dalam Tabel 3.10 berikut ini.

Tabel 3.10 ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 77 -

Tabel 3.10  
Sasaran Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Wilayah Kalimantan

Sasaran	Tahun Dasar	Target					KELUARAN JANGKA MENENGAH	Tahun Dasar	Target					KELUARAN JANGKA PENDEK	Tahun Dasar	Target				
	2014	2015*	2016	2017	2018	2019		2014	2015*	2016	2017	2018	2019		2014	2015*	2016	2017	2018	2019
Meningkatnya IPM di Daerah Tertinggal	62,86	63,69	64,40	65,17	65,91	66,67	Kesehatan (Angka Harapan Hidup)	69,84	69,96	70,09	70,22	70,35	70,48	Jumlah Dokter per 1000 Penduduk* (Persentase)	0,21**	0,23	0,24	0,28	0,31	0,35
							Harapan Lama Sekolah (tahun)	11,38	11,65	11,94	12,24	12,56	12,90	Angka Partisipasi Sekolah Menengah Pertama (Persentase)	91,33	91,53	90,79	91,64	92,07	92,49
							Standar hidup layak (Pendapatan Nasional Bruto Perkapita) (Ribu rupiah per tahun)	7,54	7,67	7,86	8,07	8,28	8,50	Angka Partisipasi Sekolah Menengah Atas (Persentase)	91,33	70,24	67,36	70,27	71,72	73,18

Meningkatnya ..



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 78 -

<b>Meningkatnya Laju Petumbuhan Ekonomi di Daerah Tertinggal (Persentase)</b>	5,08	4,16	5,82	5,63	5,44	5,07	<b>Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja (Produk Domestik Regional Bruto/Tenaga Kerja) (Juta/orang/tahun)</b>	48,48	50,49	53,42	55,64	58,63	61,56	<b>Peningkatan persentase desa dengan ketersediaan jalan memadai (jalan aspal)* (Persentase)</b>	29,42**	30,07	31,15	32,23	33,31	34,51
<b>Penurunan Persentase Penduduk Miskin (Persentase)</b>	9,49	9,56	8,74	7,93	7,11	6,30	<b>Penurunan Persentase Penduduk Miskin (Garis Kemiskinan) (Rp/kapita/bulan)</b>	3.474.891	4.135.582	4.601.477	5.121.419	5.701.871	6.350.087	<b>Peningkatan persentase rumah tangga pengguna listrik &amp; air bersih (Utilitas) (Persentase)</b>	76,83	78,82	80,81	82,43	84,06	87,31

Ket:

\* Realisasi

\*\* Data Podes 2014

Sumber: BPS (Podes 2014, Susenas 2015) data diolah Dit. PIDT KDPDPT, 2017

4. Arah ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 79 -

4. Arah Kebijakan Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Wilayah Kalimantan

Arah kebijakan percepatan pembangunan daerah tertinggal di wilayah Kalimantan meliputi pembangunan infrastruktur penunjang konektivitas antara daerah pinggiran seperti daerah tertinggal dan kawasan perbatasan ke pusat pertumbuhan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemenuhan kebutuhan dasar dan kebutuhan pelayanan dasar publik, promosi potensi daerah tertinggal untuk mempercepat pembangunan dan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan daerah, serta pengembangan perekonomian masyarakat yang berbasis sektor unggulan lokal.

5. Strategi Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Wilayah Kalimantan

a. Kriteria Aksesibilitas

Dalam rangka meningkatkan akses pelayanan dasar publik, perlu dilakukan peningkatan konektivitas wilayah di daerah tertinggal melalui:

- 1) pembangunan pelabuhan pedalaman terutama di Kabupaten Ketapang, Sambas, Nunukan, Kapuas Hulu, dan Seruyan;
- 2) pengembangan pelabuhan sebagai penghubung rute regional dan antarpulau terutama di Kabupaten Ketapang, Sambas, Nunukan, Kapuas Hulu, dan Seruyan; dan
- 3) pembangunan dan pengembangan bandar udara terutama di Kabupaten Sintang, Nunukan, Kayong Utara, Ketapang, Kapuas Hulu, Melawi, Seruyan, dan Mahakam Ulu.

b. Kriteria ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 80 -

b. Kriteria Sumber Daya Manusia

- 1) pemerataan distribusi, peningkatan kapasitas, dan pemberian tunjangan khusus kepada guru terutama di Kabupaten Bengkayang, Sambas, Melawi, Kayong Utara, dan Mahakam Ulu;
- 2) penyelenggaraan guru kunjung terutama di Kabupaten Kayong Utara, Sambas, Bengkayang, Ketapang, Sintang, Kapuas Hulu, dan Melawi;
- 3) pemberian beasiswa bagi anak-anak kurang mampu di kawasan perbatasan;
- 4) pengembangan pendidikan kesetaraan paket A, B, dan C;
- 5) pengembangan pendidikan jarak jauh;
- 6) pengembangan pendidikan dan pelatihan profesi untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja;
- 7) mengembangkan dan meningkatkan pendidikan kejuruan dan keterampilan berbasis sumber daya lokal, baik dalam bidang perkebunan, pariwisata, maupun pertambangan terutama di Kabupaten Sambas, Bengkayang, Sintang, dan Kapuas Hulu;
- 8) pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan, obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai (BMHP);
- 9) pemberian tunjangan tenaga kesehatan terutama di Kabupaten Sambas, Hulu Sungai Utara, Kayong Utara, Landak, Kapuas Hulu, dan Seruyan; dan
- 10) mengoptimalkan program kemitraan dan bina lingkungan dan tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*) dalam pemenuhan standar pelayanan minimal.

c. Kriteria ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 81 -

c. Kriteria Sarana dan Prasarana

- 1) pengembangan sarana prasarana transportasi darat dilakukan melalui:
  - a) pembangunan infrastruktur jalan dan sarana transportasi di seluruh daerah tertinggal;
  - b) pembangunan dan peningkatan kapasitas jalan penghubung nasional di kawasan perbatasan menuju pusat pertumbuhan;
  - c) peningkatan kapasitas jalan pendukung kawasan industri; dan
  - d) pembangunan jalan penghubung Kecamatan Paminggir Danau Panggang (Hulu Sungai Utara).
- 2) sarana dan prasarana pendidikan yang dikembangkan melalui:
  - a) pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana pendidikan untuk mendukung wajib belajar 9 (sembilan) tahun;
  - b) pembangunan sekolah, asrama sekolah, sekolah berasrama, atau ruang kelas baru; dan
  - c) pemberian tunjangan bagi tenaga pendidik di daerah tertinggal.
- 3) sarana dan prasarana kesehatan yang dikembangkan melalui:
  - a) pemerataan tenaga kesehatan, peningkatan kapasitas, dan pemberian tunjangan di seluruh daerah tertinggal terutama di Sambas, Landak, Kayong Utara, Bengkayang, Melawi, Hulu Sungai Utara, Ketapang, Sintang, dan Kapuas Hulu;
  - b) pembangunan, rehabilitasi dan peningkatan sarana kesehatan dengan pengadaan sarana kesehatan keliling;

c) pusat ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 82 -

- c) pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) terapung;  
dan
- d) pengembangan fasilitas rumah sakit umum daerah  
pratama di Daerah Tertinggal, Perbatasan, dan  
Kepulauan terluar (DTPK).
- 4) pemenuhan kebutuhan elektrifikasi terutama di seluruh  
wilayah yang belum terlistriki;
- 5) pembangunan sarana dan prasarana informasi dan  
telekomunikasi melalui:
  - a) penyediaan infrastruktur penyiaran publik dan  
peningkatan jangkauan siaran melalui revitalisasi  
infrastruktur penyiaran publik;
  - b) penyediaan stasiun pemancar atau *Base Transceiver  
Station (BTS)* di wilayah nirsinyal (*blankspot*) layanan  
telekomunikasi; dan
  - c) penyediaan akses pita lebar (*broadband*) internet.
- 6) pengembangan di bidang permukiman dan air bersih  
meliputi:
  - a) pembangunan perumahan layak huni;
  - b) pembangunan sarana air bersih; dan
  - c) perbaikan lingkungan permukiman tidak layak huni,  
khususnya di kawasan hutan, perairan, dan pesisir.

d. Kriteria Karakteristik Daerah

Penanganan karakteristik daerah terutama di Kabupaten  
Hulu Sungai Utara, Mahakam Ulu, Ketapang, Melawi,  
Sambas, Nunukan, dan Kapuas Hulu dilakukan sebagai  
berikut:

- 1) penanganan daerah rawan bencana banjir, tanah  
longsor, dan kebakaran hutan;
- 2) peningkatan dan pemanfaatan potensi sumber daya  
kawasan hutan, dan lahan kritis dengan  
memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan;  
dan
- 3) pemulihan kawasan konflik.

e. Kriteria ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 83 -

e. Kriteria Kemampuan Keuangan Daerah

Untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah terutama di Kabupaten Kayong Utara, Bengkayang, Hulu Sungai Utara, Melawi, Landak, dan Sambas, dilakukan strategi sebagai berikut:

- 1) pendidikan dan pelatihan kualitas aparatur daerah khususnya terkait pengembangan ekonomi daerah dan ekonomi masyarakat sesuai potensi daerah;
- 2) koordinasi dan sinkronisasi antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah dan antarsatuan kerja perangkat daerah dalam penyelenggaraan program pembangunan di daerah;
- 3) pemberian insentif untuk pihak swasta dalam proses pengembangan usaha di kabupaten tertinggal; dan
- 4) optimalisasi peran badan usaha milik daerah khususnya subsektor perkebunan rakyat, hasil hutan, perikanan darat, dan pertambangan rakyat.

f. Kriteria Perekonomian Masyarakat

Perekonomian daerah tertinggal di wilayah Kalimantan ditopang oleh pertanian terutama perkebunan dan industri pengolahan, serta sektor perikanan dan kehutanan. Pengembangan perekonomian tersebut perlu memperhatikan fungsi Kalimantan sebagai paru-paru dunia dengan cara konservasi dan rehabilitasi daerah aliran sungai, lahan kritis, hutan lindung, dan hutan produksi.

Selain berpotensi menjadi salah satu lumbung pangan nasional, perekonomian masyarakat di wilayah Kalimantan ditingkatkan dengan mengembangkan industri berbasis komoditas kelapa sawit dan karet. Adapun strategi peningkatan perekonomian masyarakat di wilayah Kalimantan meliputi:

- 1) sarana pendukung perikanan berupa pembangunan pabrik es, ruang penyimpanan berpendingin (*cold storage*), pembangunan irigasi rawa, dan embung desa;

2) sarana ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 84 -

- 2) sarana pendukung pengembangan minapadi, bibit peternakan produk unggulan desa (prudes), berupa ayam buras, itik, dan kambing, sarana pendukung produktivitas padi lokal, pengembangan potensi wisata Bedawat dan Riam Remabo/Dait;
- 3) pembangunan kolam terpal sebagai fasilitas pendukung produktivitas ikan dan dukungan fasilitas pengelolaan pascapanen berupa penyimpanan ikan;
- 4) pengembangan durian empakan, pengembangan dan demonstrasi budidaya jamur, pengadaan peralatan pengolahan ikan/penggiling daging, pengadaan alat bantu penangkapan dan pengolahan, pembangunan bangsal pengolahan hasil perikanan (bangsal pengasapan);
- 5) penyediaan alat pengolahan hasil perkebunan tanaman kopi, penyediaan alat/sarana pascapanen tanaman karet, pembangunan kebun sumber benih tanaman kelapa sawit, pengembangan perkebunan jagung, perluasan dermaga pusat pendaratan ikan, bantuan ternak sapi, percontohan budidaya air payau paket polikultur udang windu, bandeng, dan rumput laut;
- 6) pengembangan agribisnis berupa produk unggulan tanaman cabai dan peternakan berupa produk unggulan ternak kambing;
- 7) pengembangan pengolahan kelapa dalam terpadu dan pengolahan rotan;
- 8) pengembangan pusat teknologi informasi dan pemasaran serta peningkatan kualitas sumber daya manusia pelaku usaha khususnya subsektor perkebunan, pengolahan hasil hutan, dan perikanan;
- 9) pengembangan kawasan secara terintegrasi (hulu-hilir), berbasis komoditi unggulan daerah antara lain sektor pertanian/perkebunan dan perikanan;
- 10) penyiapan kawasan pengembangan komoditas tanaman pangan, pertanian pangan, kelapa sawit, karet, dan rotan;
- 11) peningkatan pembinaan dan pendampingan pengelolaan komoditas unggulan kelapa sawit, karet, dan rotan; dan
- 12) pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) untuk mendukung aktivitas ekonomi masyarakat perdesaan.

F. Percepatan ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 85 -

F. Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal di Wilayah Jawa

1. Penyebab Utama Ketertinggalan di Wilayah Jawa

Berdasarkan analisis indeks ketertinggalan pada 113 (seratus tiga belas) kabupaten/kota di wilayah Jawa, terdapat 6 (enam) kabupaten sebesar 5,04% (lima koma nol empat persen) yang dikategorikan tertinggal dan 107 (seratus tujuh) kabupaten/kota sebesar 94,96% (sembilan puluh empat koma sembilan puluh enam persen) tidak tertinggal. Daftar kabupaten tertinggal dan penyebab utama ketertinggalan di wilayah Jawa akan ditunjukkan dalam Tabel 3.11 berikut ini.

Tabel 3.11  
Daftar Kabupaten Tertinggal dan Penyebab Utama Ketertinggalan  
di Wilayah Jawa Tahun 2015-2019

No.	Kabupaten	Provinsi	Penyebab Utama Ketertinggalan Menurut Urutan					
			1	2	3	4	5	6
1.	Bondowoso	Jawa Timur	Sumber Daya Manusia	Kemampuan Keuangan Daerah	-	-	-	-
2.	Situbondo		Sumber Daya Manusia	Sarana dan Prasarana	Kemampuan Keuangan Daerah	Karakteristik Daerah	-	-
3.	Bangkalan		Sumber Daya Manusia	-	-	-	-	-
4.	Sampang		Sumber Daya Manusia	Ekonomi	Kemampuan Keuangan Daerah	-	-	-
5.	Pandeglang	Banten	Sumber Daya Manusia	Sarana dan Prasarana	Karakteristik Daerah	-	-	-
6.	Lebak		Sumber Daya Manusia	Karakteristik Daerah	Sarana dan Prasarana	-	-	-

2. Potensi dan Keterkaitan Wilayah

Pengembangan wilayah Jawa diprioritaskan pada percepatan keterkaitan dan manfaat antara kota dan desa, melalui penguatan sistem perkotaan nasional dengan cara peningkatan efisiensi pengelolaan 4 (empat) kawasan perkotaan metropolitan di wilayah Jawa, yakni kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek), Bandung Raya, Kendal, Demak, Ungaran, Semarang, Purwodadi (Kedungsepur), dan Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo (Gerbangkertosusilo).

Sejalan ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 86 -

Sejalan dengan hal tersebut, pengembangan sektor primer sebagai sektor basis daerah tertinggal di wilayah Jawa diarahkan untuk penguatan keterkaitan ekonomi lokal antara perkotaan dengan perdesaan, melalui integrasi perdesaan mandiri pada 4 (empat) kawasan yang ada, dengan harapan akan menjadi kawasan agropolitan dan minapolitan serta kawasan pariwisata. Selain untuk meningkatkan nilai tambah, diharapkan dapat mentransformasikan struktur ekonomi kabupaten tertinggal di wilayah Jawa, dari sektor pertanian menjadi sektor industri dan jasa berbasis pendekatan kawasan agropolitan, minapolitan, dan kawasan pariwisata.

Pengembangan sektor unggulan daerah tertinggal di wilayah Jawa bagian barat (Kabupaten Pandeglang dan Lebak) dilakukan melalui peningkatan produktivitas di hulu (perikanan dan kelautan, perkebunan, tanaman pangan dan hortikultura), percepatan industrialisasi berbasis industri, dan jasa. Sementara itu, pengembangan di wilayah Jawa bagian timur (Kabupaten Bondowoso, Situbondo, Sampang, dan Bangkalan) dilakukan melalui peningkatan produktivitas tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kelautan.

Untuk menunjang pengembangan sektor unggulan tersebut, diperlukan pengembangan ekonomi wilayah secara terintegrasi dari aspek hulu dan hilir (keterkaitan sektor) dengan meningkatkan konektivitas antara daerah tertinggal dengan pusat pertumbuhan/kawasan strategis yakni dengan Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung dan Kawasan Gerbangkertosusilo. Selanjutnya, orientasi pengembangan sektor tersebut ditujukan pada gerai pemasaran di wilayah Jawa yakni ke Pusat Kegiatan Nasional Serang, Pusat Kegiatan Nasional Cilegon, dan Pusat Kegiatan Nasional Gerbangkertosusilo.

Gambar 6 ...





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 106 -

BAB IV  
PENUTUP

Demikian STRANAS-PPDT ini disusun untuk menjadi pedoman perencanaan strategis dalam mencapai sasaran percepatan pembangunan daerah tertinggal baik di tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten, agar koordinasi antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, serta pemangku kepentingan lainnya dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penganggaran dapat berjalan secara efektif dan efisien.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI

Deputi Bidang Pembangunan

Manusia dan Kebudayaan,



Surat Indrijarso